



BULETIN KETENAGALISTRIKAN

Edisi 69 Volume XVIII / Maret 2022

10

Mengenal SLO
Syarat Penyambungan
Listrik yang Aman

6

Pilih Instalatir Resmi dan
Berizin Pasti Lebih Aman

14

Laporan dari ETWG 1:
Masa Depan Energi
di Tangan Generasi Muda

54

Ditjen Ketenagalistrikan
Siap Jalankan
Program Tahun 2022



MAKLUMAT PELAYANAN GATRIK UNTUK PELAYANAN PUBLIK LEBIH BAIK



26 LAYANAN PUBLIK DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Telah ditetapkan dalam
Kepdirjen 412.K/KP.07/DJL.1/2021 tentang
Standar Pelayanan Publik



NO.	NAMA LAYANAN
1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU);
2	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)
3	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
5	Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara
6	Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara
7	Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara
8	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
9	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum
10	Layanan Pengaduan Kepesertaan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
11	Layanan Pengaduan Konsumen Listrik
12	Persetujuan dan Pemandasahan Rencana Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
13	Registrasi Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan
14	Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik (Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah
15	Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik (Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah);
16	Penunjukan Lembaga Penilai Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Yang Berada Dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
17	Penetapan Besaran Kompensasi Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
18	Penghitungan dan Pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca dari Unit Pembangkit Tenaga Listrik
19	Registrasi Sertifikat Kompetensi dan/atau Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
20	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan
21	Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
22	Registrasi Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
23	Perizinan Berusaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
24	Registrasi Laporan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Telematika)
25	Layanan Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
26	Layanan Pengelolaan Permintaan Informasi Publik (PPID) dan Pengaduan Publik



BULETIN KETENAGALISTRIKAN

Edisi 69 Volume XVIII / Maret 2022

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur

Nur Hidayanto
Sansuadi
Edy Pratiknyo
Pandu Satria Jati
Anggita Miftah Hairani
Wisnu Pujiyanto
Fajar Rahmadhy
Khairiah Dewi
Syifaul Barir
Hagni Surendro

Penyunting/Editor

Utami Hikmaasih
Agnes Tania

Desain Grafis

Aslan Firdaus
Agus Surahman

Fotografer

Rahmad Cahyo Nugroho
Additya Fitroh Firmansyah
Virbyansah Achmadan N
Agah Muhammad Abduh
Ajat Munajat

Sekretariat

Ulung Sukmana
Zaenal
Beni Hendrawan

Alamat Redaksi

Redaksi Buletin Ketenagalistrikan
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,
Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950

www.gatrik.esdm.go.id

DARI REDAKSI

Pembaca Setia,

Kepedulian atas penyambungan instalasi listrik yang aman sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan menjadi tanggung jawab kita bersama. Terlebih, listrik selain bermanfaat juga memiliki potensi bahaya seperti mengakibatkan terjadinya kebakaran. Untuk mendapatkan instalasi listrik yang aman, tahap awal yang harus dilakukan masyarakat adalah memilih badan usaha pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atau instalatir yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik. Ulasan lengkap mengenai hal ini menjadi Tajuk Utama pada Buletin Ketenagalistrikan edisi Maret 2022 ini.

Bahasan selanjutnya adalah Liputan Khusus berupa laporan dari Energy Transitions Working Group (ETWG) I di Yogyakarta. Acara ini merupakan rangkaian acara Presidensi G20 di Indonesia untuk membahas masa depan energi dunia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam pembukaan ETWG menekankan pentingnya dukungan dari negara anggota G20 dalam proses transisi energi.

Pada rubrik Warta Kita, beberapa isu diangkat mulai dari program prioritas ketenagalistrikan tahun 2022, infrastruktur ketenagalistrikan yang makin bertambah, hingga upaya pemerintah muluskan peta jalan transisi energi menuju karbon netral.

Selamat membaca!

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Syarat Teknis :

1. Font penulisan naskah menggunakan Arial
2. Ukuran font yang digunakan 12
3. Jarak spasi penulisan 1,5
4. Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata

Syarat Umum:

1. Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
2. Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
3. Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
4. Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
5. Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
6. Naskah dikirim melalui email ke infogatrik@esdm.go.id
7. Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan caption
8. Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
9. Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan

DAFTAR ISI

BULETIN KETENAGALISTRIKAN

Tajuk Utama

- 6** Pilih Instalatir Resmi dan Berizin Pasti Lebih Aman
- 8** Dirjen Gatrik Ajak Masyarakat untuk Peduli Proses Penyambungan Listrik yang Aman
- 10** Mengenal SLO Syarat Penyambungan Listrik yang Aman
- 12** Memilih Instalatir Resmi dan Berizin, Langkah Awal Keselamatan Ketenagalistrikan

Liputan Khusus

- 14** Laporan dari ETWG 1: Masa Depan Energi di Tangan Generasi Muda
- 16** Laporan dari ETWG 1: Peran Negara Anggota G20 Sangat Strategis dalam Transisi Energi
- 18** Laporan dari ETWG I: Program De Dieselisasi Untuk Energi Bersih

Warta Kita

- 20** Dorong Partisipasi Publik, Ditjen Gatrik Gelar Bedah Paper Kajian Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
- 22** Presiden Jokowi Resmikan SPKLU Ultra Fast Charging Pertama di Indonesia

- 24** Lantik 10 Pejabat Fungsional, Ini Pesan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
- 26** Pemerintah Dorong PLTS Atap Penuhi Kebutuhan Industri
- 28** Analogi NIDI sebagai “Akta Lahir” Instalasi Listrik
- 29** Dukung Transisi Energi, ESDM Konversi 1.000 Motor BBM ke Motor Listrik
- 30** Presiden Jokowi Resmikan PLTA Poso Energy dan Malea Energy
- 32** Ini Strategi Pemerintah Muluskan Peta Jalan Transisi Energi Menuju Karbon Netral
- 33** Kementerian ESDM Pastikan Kebutuhan Listrik Cukup dan Andal untuk MotoGP
- 34** Ditjen Gatrik Berpartisipasi dalam Special Senior Officials’ Meeting on Energy (SOME) 2022
- 36** Transformasi Energi, Indonesia Belajar dari Kisah Sukses Hawaii
- 38** Ide Supergrid Nusantara Diapresiasi Dapat Tingkatkan Bauran EBT
- 40** Kementerian ESDM Kawal Infrastruktur KBLBB
- 41** Ini Program Prioritas Ketenagalistrikan di 2022
- 42** AKLI Agar Dapat Mendorong Badan Usaha Manfaatkan Kemudahan SI Ujang Gatrik
- 44** Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Disiapkan Regulasinya
- 46** Semakin Bertambah, 267 SPKLU dan 266 SPBKLU Telah Dibangun
- 47** Lantik 49 PNS, Sekjen KESDM Tekankan Kerja Keras Dan Profesionalisme Aparatur Negara
- 48** Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik, PLN Tambah Dua SPKLU di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan
- 50** Menteri ESDM Serahkan DIPA 2022, Sebagian Besar Anggaran untuk Kegiatan Prioritas Nasional dan Penguatan Akses Energi
- 52** Kementerian ESDM dan PLN Siap Amankan Pasokan Listrik Jelang Nataru
- 54** Ditjen Ketenagalistrikan Siap Jalankan Program Tahun 2022
- 56** Wujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen Ketenagalistrikan Lakukan Penandatanganan Kinerja Tahun Anggaran 2022
- 58** Kementerian ESDM Kawal Infrastruktur KBLBB

PILIH INSTALATIR RESMI DAN BERIZIN PASTI LEBIH AMAN

Kualitas instalasi listrik menjadi perhatian Achmad Shodiq (28), saat akan melakukan pemasangan baru listrik, agar terjamin keamanannya. Achmad merupakan pelanggan Lembaga Inspeksi Teknik-Tegangan Rendah (LIT-TR) yang berada di perumahan daerah Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah.

“Instalasi listrik yang terpasang dalam bangunan harus sesuai syarat keamanan dan kualitasnya,” jelas Achmad saat ditemui di Semarang, beberapa pekan lalu. Untuk menjamin keamanan dan mengurangi potensi bahaya, Achmad memulai dengan memilih instalatir listrik yang resmi dan berizin.

Senada dengan Achmad, keselamatan ketenagalistrikan juga menjadi prioritas pengguna instalatir resmi, Pepep Rodianto (39) yang tinggal di daerah

Bogor, Jawa Barat. “Dengan menggunakan instalatir berizin, kami harap bisa mengurangi adanya konsleting atau kebakaran (akibat listrik), kalau yang bersertifikat kan berarti sudah terpercaya,” ungkap Pepep.

Seperti halnya Achmad dan Pepep, masyarakat perlu memahami bahwa instalasi listrik harus dikerjakan oleh tenaga teknik berkompeten melalui instalatir resmi dan berizin.

“Instalasi listrik yang dipasang oleh instalatir resmi dan berizin akan mendapatkan ‘akta lahir’ berupa Nomor Identitas Instalasi Listrik (NIDI),” ungkap Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, di Jakarta, Kamis (10/3).



Rida menjelaskan, NIDI memuat lokasi dan tanggal selesai pemasangan instalasi listrik, badan usaha pemasangan instalasi listrik, spesifikasi komponen terpasang, hingga gambar instalasi listrik. Pemberian NIDI diberikan berdasarkan hasil pelaporan pekerjaan yang dilakukan oleh instalatir resmi dan berizin melalui aplikasi Si Ujang Gatrik.

“Detail informasi yang terkandung dalam NIDI ini merupakan informasi yang digunakan sebagai prasyarat untuk permohonan Sertifikasi Laik Operasi atau SLO,” ucap Rida.

Setelah mendapatkan NIDI, masyarakat bisa segera menghubungi Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) untuk proses pembuatan SLO melalui aplikasi Si Ujang Gatrik.

Ketika ditanya soal biaya, Achmad menyebut biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan instalasi listrik oleh petugas LIT-TR, cukup terjangkau. “Biayanya kira-kira Rp200.000. Dengan biaya segitu, instalasi listrik aman,” ungkapnya.

Lebih Mudah dengan Si Ujang Gatrik

Sebagai salah satu upaya pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menerbitkan aplikasi Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Si Ujang Gatrik) yang merupakan integrasi



Instalatir melakukan pengecekan pada instalasi yang sudah terpasang menggunakan Si Ujang Gatrik.

beberapa layanan ketenagalistrikan yang sudah berjalan secara online, seperti Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK), Sertifikasi Badan Usaha (SBU), dan SLO.

“Melalui Si Ujang Gatrik, diharapkan masyarakat dan para pelaku usaha di subsektor ketenagalistrikan dapat dengan mudah menemukan dan mengakses penyedia jasa penunjang tenaga listrik, khususnya badan usaha pembangunan dan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang terdekat dari lokasi dan telah memiliki perizinan berusaha,” ujar Rida.

Si Ujang Gatrik memudahkan badan usaha pembangunan dan pemasangan instalasi listrik untuk mencari konsumen. Manajer Teknik PT Pancar Teknik, Yega Rifaldi mengakui bahwa aplikasi Si Ujang

Gatrik dinilai sangat membantu proses pengajuan pemasangan instalasi.

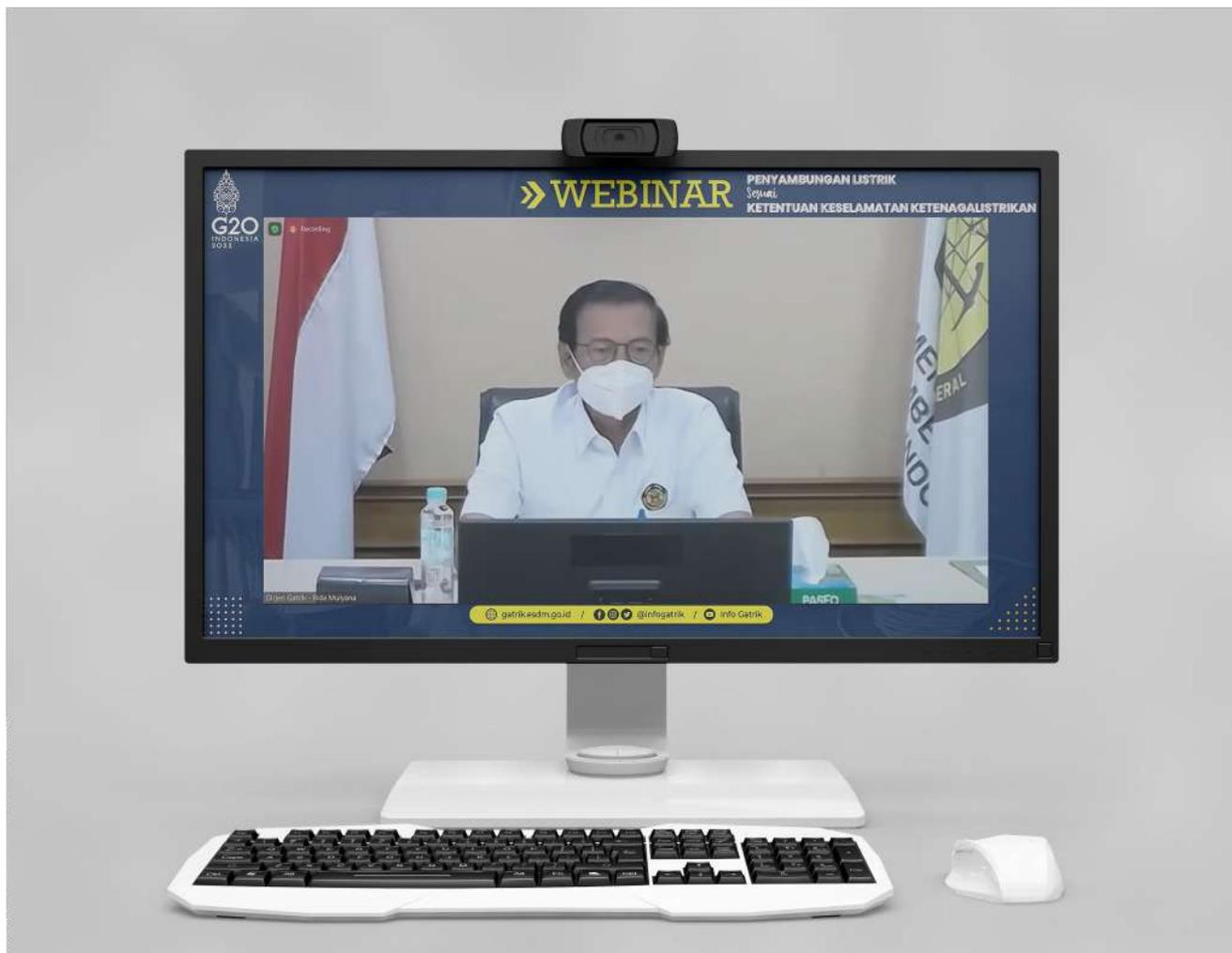
Seluruh proses verifikasi dilakukan melalui aplikasi tersebut setelah melakukan pengajuan dari saluran telepon.

“Aplikasi Si Ujang Gatrik saat ini sudah mumpuni, data yang diserahkan oleh calon pelanggan PLN itu sangat komplit sehingga bisa segera kita lakukan verifikasi,” pungkas Yega.

Masyarakat yang akan pasang baru listrik dapat menghubungi instalatir listrik tersertifikasi melalui aplikasi Si Ujang Gatrik pada laman <https://siujang.esdm.go.id/> untuk memasang instalasi listrik di rumahnya. (Tim Komunikasi Kementerian ESDM)

#InstalatirResmiLebihAman
#ListrikAman

DIRJEN GATRIK AJAK MASYARAKAT UNTUK PEDULI PROSES PENYAMBUNGAN LISTRIK YANG AMAN



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana dalam Webinar Penyambungan Listrik sesuai Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan, Kamis (10/3/2022).

“ Dengan instalasi terpasang yang telah memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan, proses mendapatkan SLO dan penyambungan listrik PLN menjadi lebih lancar ”

Rida Mulyana

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengajak masyarakat untuk peduli pada proses penyambungan listrik yang aman dan sesuai ketentuan keselamatan ketenagalistrikan. Terlebih, listrik selain bermanfaat juga memiliki potensi bahaya seperti mengakibatkan terjadinya kebakaran. Menurutnya, tahap awal yang harus dilakukan masyarakat adalah memilih badan usaha pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atau instalatir yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik.

Hal tersebut disampaikan Rida dalam Webinar Penyambungan Listrik sesuai Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan, Kamis (10/3/2022).

Webinar ini dilatarbelakangi banyaknya pertanyaan dari masyarakat tentang tahap-tahap penyambungan instalasi listrik yang sesuai dengan regulasi. Hadir sebagai narasumber, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar, EVP Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN (Persero) Munief Budiman, serta Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Puji Muhandi.

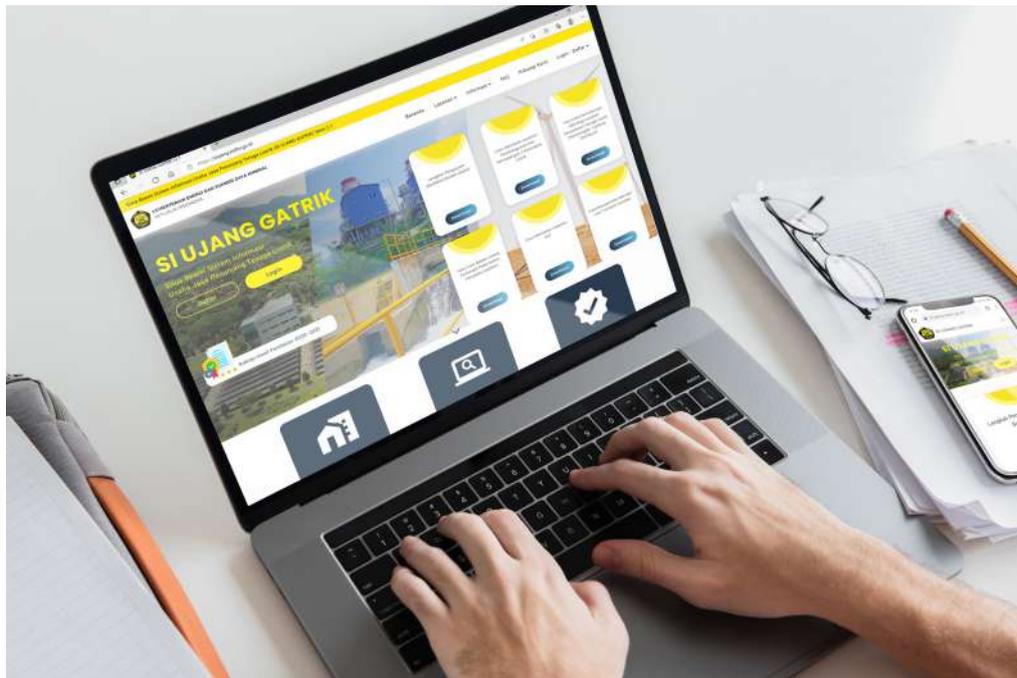
Menurut Rida, hasil pelaporan pekerjaan yang dilakukan oleh instalatir listrik oleh diberikan nomor unik yang dinamakan Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI). Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM No 05 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM.

NIDI merupakan akta lahir dari suatu instalasi tenaga listrik yang memuat detail informasi dari instalasi listrik tersebut. Detail informasi yang terkandung dalam NIDI ini merupakan informasi yang digunakan sebagai prasyarat permohonan Sertifikasi Laik Operasi (SLO). Seperti diketahui, SLO yang diterbitkan Lembaga Inspeksi Teknis Tegangan Rendah (LIT-TR) merupakan syarat untuk pasang baru listrik pada PT PLN (Persero).

“Dengan instalasi terpasang yang telah memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan, proses mendapatkan SLO dan penyambungan listrik PLN menjadi lebih lancar,” tutur Rida.

Melalui SI Ujang Lebih Mudah

Sebagai upaya mempermudah masyarakat dan badan usaha mengakses jasa instalatir dan LIT-TR, Kementerian ESDM telah menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik atau disingkat SI UJANG GATRIK yang dapat diakses pada melalui laman siujung.esdm.go.id.



“Diharapkan masyarakat dan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan dapat menggunakan badan usaha yang kompeten dan memiliki perizinan berusaha dalam melakukan pemasangan instalasi tenaga listrik. Di sisi lain, layanan ini membantu para instalatir untuk menciptakan lapangan kerja di masa pandemi Covid-19 saat ini,” jelasnya.

Senada, Wanhar menyampaikan manfaat SI UJANG yang dapat dijangkau di seluruh Indonesia. Menurutnya dengan aplikasi ini, dimungkinkan instalatir yang ada di suatu kota dapat menugaskan atau melakukan pekerjaan di kota lain dengan memiliki tenaga teknik atau Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Karena sebagaimana kita ketahui bersama, instalatir itu wilayah usahanya tidak hanya di lokasi setempat tapi di seluruh Indonesia,” ujar Wanhar. Puji dalam paparannya menyebut setidaknya ada empat hal untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan dalam pemasangan

instalasi listrik, yakni badan usaha/ instalatir yang berizin, tenaga yang kompeten, material yang dipasang harus ber-SNI, dan pemasangannya harus sesuai dengan PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik).

“Ini semua dilakukan agar instalasi aman, mudah dalam penggunaan, mudah dalam pemeliharaan,” kata Puji. Dalam kesempatan yang sama, Munief menyampaikan PLN memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk berinteraksi dengan menyediakan beberapa pintu layanan. Pelanggan dapat mengajukan permohonan sambung baru listrik melalui PLN Mobile, Contact Center 123, website PLN <https://web.pln.co.id>, dan loket PLN.

“Kami dari PLN akan bersama-sama membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan lagi (mengenai instalasi listrik aman-red) sehingga hal-hal yang akan merugikan masyarakat dapat dihindari, masyarakat tidak lagi menjadi objek dari pelaku-pelaku pemasangan instalasi listrik yang tidak resmi dan tidak terdaftar,” pungkasnya. (AMH)

“SLO merupakan bukti legal bahwa instalasi tenaga listrik yang dipasang telah sesuai standar dan aman”

Winsisma Wansyah

MENGENAL SYARAT PENYAMBUNGAN LISTRIK

Listrik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun listrik selain bermanfaat juga berbahaya, untuk itu keselamatan ketenagalistrikan menjadi hal yang sangat penting. Karena itu pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan guna mewujudkan kondisi yang andal dan aman bagi instalasi, serta aman dari bahaya.

Ketentuan dari pemerintah ini dipahami oleh Achmad Shodiq (28) project manager Perumahan dan Ruko Syariah Graha Mukti Kusuma yang berlokasi di Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah. Ia sadar betul pentingnya pelayanan prima untuk konsumennya. Dengan lugas, ia menegaskan keamanan menjadi prioritasnya, tak terkecuali dengan keamanan instalasi listrik pada perumahan yang ia kembangkan. Untuk itu, instalasi listrik yang telah terpasang di perumahan tersebut telah dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) PT. PPILN, Rabu (2/3/2022).

Achmad memahami, listrik yang tak aman dapat membahayakan serta dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mengurangi potensi bahaya itu, Achmad memulai dengan memilih instalatir listrik yang resmi dan berizin. Setelahnya memperoleh Nomor Identitas Instalasi Listrik (NIDI), ia mengajukan SLO agar instalasi listrik di perumahan tersebut dapat segera dialiri listrik oleh PT. PLN (Persero).

“Karena hubungannya sama konsumen, jadi kita harus kasi angka aman yang tinggi. Kalau listrik aman, after sales-nya juga bagus,” tambahnya.

Salah satu bentuk upaya keselamatan ketenagalistrikan yang diatur oleh kementerian ESDM adalah perlunya persyaratan SLO sebelum proses penyambungan listrik. SLO merupakan bukti pengakuan formal bahwa suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan standar yang ditentukan bagi instalasi tersebut dan dinyatakan laik dioperasikan. Dengan kata lain, persyaratan SLO tersebut menjadi indikasi bahwa suatu instalasi tenaga listrik dapat beroperasi secara sah dan aman.

“SLO merupakan bukti legal bahwa instalasi tenaga listrik yang dipasang telah sesuai standar dan aman,” ujar Koordinator

SLO

YANG AMAN

Hukum Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Winsisma Wansyah.

Menurut Winsisma, sesuai regulasi disebutkan bahwa SLO dapat dikeluarkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik setelah dilakukan pemeriksaan bahwa instalasi tersebut menggunakan peralatan yang telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), dipasang oleh instalatir yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan dipasang sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL). SLO dibutuhkan pada saat mendapatkan sambungan listrik baru atau penambahan daya dari PLN, dan jika terjadi penambahan atau rekondisi instalasi, serta pada saat instalasi telah berumur lebih dari 15 tahun.

Satu Pintu Melalui SI Ujang Gatrik

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menerbitkan Aplikasi Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Si Ujang Gatrik) yang merupakan integrasi beberapa layanan ketenagalistrikan yang sudah berjalan secara online, seperti Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan (SKTTK), Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).

Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses instalatir listrik terdekat yang telah memiliki izin usaha Layanan Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Listrik, serta Lembaga Inspeksi Teknik untuk memperoleh SLO.

Cara mendapatkan SLO diawali dengan pemohon membuat permohonan SLO dengan melengkapi persyaratan dan memastikan instalasi sudah terpasang serta sudah memiliki Nomor Identitas Instalasi (NIDI). Pemohon dapat mendaftar ke Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah terdekat atau melakukan pendaftaran online.

PT PPILN merupakan salah satu Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga teknik tegangan rendah dan menerbitkan SLO.

Setelah mendapatkan order dari Achmad Shodiq melalui aplikasi SI Ujang Gatrik, PT PPILN melakukan verifikasi data permohonan tersebut dan berkoordinasi dengan pemohon

terkait administrasi dan jadwal pemeriksaan dan pengujian instalasi. Proses pembayaran SLO dapat dilakukan secara tunai atau non tunai melalui kode bayar yang sudah diinformasikan. Jika sesuai, PPILN akan menugaskan tenaga teknik untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pada order yang dilakukan Achmad di lokasi perumahan Putma Group, PT. PPILN menugaskan Kristyanto, Tenaga Teknik bersertifikat untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian di lokasi perumahan tersebut.

"Pertama kita cek dokumentasi instalasi apakah sesuai dengan lokasi, kalau sudah dipastikan benar dan sesuai, maka kami lakukan langkah-langkah pengecekan instalasi," ungkap Kristyanto.

Jika verifikasi dan evaluasi hasil pemeriksaan sesuai dengan SNI dan PUIL (Persyaratan Umum Instalasi Listrik) dinyatakan laik operasi, PPILN akan menerbitkan SLO.

Direktur Utama PT. PPILN Edy Sayudi mengatakan, PPILN peduli terhadap keselamatan masyarakat dari bahaya instalasi listrik yang tidak aman. Edy menyampaikan, untuk menjaga kualitas inspeksi PPILN, banyak proses yang dilakukan, antara lain memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa tenaga teknik serta penanggung jawab teknik bekerja secara profesional, dan untuk menjaga kualitas tetap terjaga dengan baik tentunya banyak strategi yang dilakukan oleh PPILN.

"Hal tersebut kami lakukan semata-mata kami sebagai kepanjangan tangan pemerintah maka untuk menjaga kualitas dan integritas wajib kita tanamkan termasuk kedisiplinan dan regulasi kita terapkan ke tenaga teknik dan penanggung jawab teknik," ujar Edy.

Winsisma dalam kegiatan kunjungan dalam rangka pengambilan dokumentasi kegiatan usaha penunjang tenaga listrik di Perumahan dan Ruko Syariah Graha Mukti Kusuma Semarang menyampaikan, pemeriksaan instalasi listrik dilakukan untuk menjamin keselamatan ketenagalistrikan dan kualitas dalam melakukan inspeksi.

"Kami berharap agar PPILN mampu menjaga kualitas dan menjaga integritas," ujar Winsisma. (AT)

MEMILIH INSTALATIR RESMI DAN BERIZIN, LANGKAH AWAL KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Matahari bersinar terik di Bogor, tepatnya di perumahan Bali Resort Bogor Kelurahan Bantarjaya, Kecamatan Ranca Bungur, khususnya di lokasi perumahan yang masih dalam proses pengerjaan pembangunan. Suara ketukan palu yang sayup-sayup terdengar, menandakan para pekerja sedang berjibaku menjalankan tugasnya membangun perumahan yang tengah dipasarkan.

Di antara para pekerja tersebut, nampak tiga pria paruh baya mengenakan rompi coklat bertuliskan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) di punggungnya. Ketiganya tengah berkutat dengan kabel listrik dan melakukan pemasangan kotak kontak pada salah satu rumah yang setengah rampung. Mereka adalah Tata, Widodo, dan Suhendi, instalatir yang telah memiliki sertifikat kompetensi resmi dari pemerintah yang tergabung dalam PT. Pancar Teknik.

Tata, Widodo, dan Suhendi merupakan tiga dari ribuan tenaga teknik berkompeten yang telah memperoleh sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan (SKTTK). Sertifikat ini merupakan pengakuan formal terhadap kemampuan seseorang yang dianggap kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya di sektor ketenagalistrikan. Di tengah ancaman bahaya kebakaran akibat listrik, pengerjaan instalasi listrik yang sesuai ketentuan memberikan asa untuk mengurangi risiko kebakaran.

Manajemen PT. MAS Group selaku pengembangan Bali Resort Bogor sadar betul mengenai pentingnya pemasangan instalasi listrik dengan instalatir berizin sesuai aturan pemerintah. Site Manager PT. Mas Group Pepap Rodianto yang ditemui di kantor pemasaran Bali Resort Bogor mengungkapkan, manajemen mencari instalatir yang berizin dan terpercaya melalui internet dan menemukan PT. Pancar Teknik sebagai Badan Usaha Pembangunan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik yang

resmi dan berizin. Pemasangan instalasi listrik yang dilakukan oleh instalatir berizin tersebut diharapkan dapat menghindari dari kejadian yang tidak diinginkan di masa depan, seperti korsleting listrik hingga kebakaran akibat listrik.

“Dengan menggunakan instalatir berizin, kami harap bisa mengurangi adanya konsleting atau kebakaran (akibat listrik), kalau yang bersertifikat kan berarti sudah terpercaya,” ungkap Pepap.

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggalakkan sosialisasi pentingnya keselamatan ketenagalistrikan, dimulai dari pengaturan pemasangan instalasi listrik tegangan rendah di rumah-rumah hingga fasilitas pembangkitan tenaga listrik berkapasitas besar.

Pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrikan

Sebagai salah satu upaya pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan,

“

Dengan menggunakan instalatir berizin, kami harap bisa mengurangi adanya konsleting atau kebakaran (akibat listrik). Kalau yang bersertifikat kan berarti sudah terpercaya



Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menerbitkan Aplikasi Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Si Ujang Gatrik) yang merupakan integrasi beberapa layanan ketenagalistrikan yang sudah berjalan secara online, seperti Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan (SKTTK), Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dan Sertifikasi

Instalator yang telah memiliki sertifikat kompetensi resmi dari pemerintah yang tergabung dalam PT. Pancar Teknik melakukan pemasangan kotak kontak.

Laik Operasi (SLO). Dalam aplikasi Si Ujang Gatrik juga terdapat layanan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses instalatir listrik terdekat yang telah memiliki izin usaha Layanan Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Listrik seperti yang dicari oleh Pelep.

Kementerian ESDM kini mewajibkan Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) sebagai salah satu syarat dikeluarkannya Sertifikat Laik Operasi (SLO) bagi jasa pemasangan listrik. Hal ini diperlukan agar instalasi listrik dapat dipastikan beroperasi dengan aman karena pembangunan dan pemasangan instalasi listrik dilakukan oleh instalatir resmi dan berizin. NIDI memuat lokasi dan tanggal selesai pemasangan instalasi listrik, badan usaha pemasangan instalasi listrik, spesifikasi komponen terpasang, hingga gambar instalasi listrik. Pemberian NIDI diberikan berdasarkan hasil pelaporan pekerjaan yang dilakukan oleh instalatir resmi dan berizin melalui aplikasi Si Ujang Gatrik.

Manajer Teknik PT Pancar Teknik Yega Rifaldi menyatakan bahwa selama ini pengajuan pemasangan instalasi yang masuk dari masyarakat masuk melalui telepon ke PT Pancar Teknik untuk kemudian diverifikasi melalui aplikasi Si Ujang Gatrik dan dilakukan instalasi atau supervisi instalasi listrik di rumah pemohon. Begitu juga pengerjaan instalasi di Bali Resort, ia laporkan dalam Aplikasi ini untuk memperoleh NIDI. "Aplikasi Si Ujang Gatrik saat ini sudah mumpuni, data yang diserahkan oleh calon pelanggan PLN itu sangat komplit sehingga bisa segera kita lakukan verifikasi," ujar Yega.

Yega menambahkan, pemerintah diharapkan lebih gencar mensosialisasikan kepada calon pelanggan listrik agar tidak kebingungan saat akan melakukan pemasangan listrik di rumahnya. Badan Usaha Instalasi Tenaga Listrik juga akan merasa terban

tu apabila masyarakat telah memahami alur pemasangan listrik sesuai dengan ketentuan. Ia berharap aplikasi Si Ujang Gatrik ini bisa menciptakan lapangan kerja dan membuka kesempatan usaha yang lebih luas di bidang jasa kelistrikan yang resmi dan berizin.

Ketua Umum AKLI Puji Muhandi menambahkan, AKLI selaku wadah kontraktor kelistrikan dan mekanikal di Indonesia berkomitmen untuk mengawal pemasangan instalasi listrik dapat sesuai dengan kebijakan regulasi yang berlaku. AKLI memastikan seluruh anggotanya memiliki persyaratan perizinan yang sesuai. Ia memastikan seluruh tenaga kerja yang berada dibawah naungan AKLI memiliki sertifikat kompetensi yang telah dipersyaratkan.

"Seperti yang kita tahu, pengerjaan listrik banyak yang disambung oleh pihak yang tidak sesuai. Dengan diberlakukannya Si Ujang Gatrik, hal tersebut bisa diminimalisir karena dengan demikian hanya Badan Usaha yang berizin yang bisa memasang instalasi listrik oleh instalatir yang bersertifikat," ujar Puji.

Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Winsisima Wansyah dalam kegiatan pengambilan dokumentasi pembangunan dan pemasangan instalasi listrik tegangan rendah Bali Resort Bogor, Rabu (23/2/2022) menyampaikan bahwa pemerintah terus mengawasi pemasangan instalasi listrik di masyarakat sesuai dengan regulasi untuk memastikan keselamatan ketenagalistrikan.

"Ini pekerjaan pemerintah, bagaimana ketentuan regulasi bisa dijalankan. Publikasi terkait keselamatan ketenagalistrikan merupakan bagian dari sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa pemasangan instalasi harus menggunakan badan usaha yang mempunyai izin," tutup Winsisima. (U)



Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam pembukaan Energy Transitions G20 Youth Forum yang merupakan rangkaian acara Energy Transitions Working Group (ETWG) di Yogyakarta, Jumat (25/3/2022).

Laporan dari ETWG I:

MASA DEPAN ENERGI DI TANGAN GENERASI MUDA

Proses transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) hingga tahun 2060 membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Dukungan dari generasi muda diharapkan bisa melanjutkan cita-cita besar dalam mewujudkan target NZE. Generasi muda diminta untuk lebih kreatif dan inovatif dalam berkontribusi dalam pengembangan teknologi di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam pembukaan Energy Transitions G20 Youth Forum yang merupakan rangkaian acara Energy Transitions Working Group (ETWG) di Yogyakarta, Jumat (25/3/2022).

“Negara kita ini kaya, sumber daya alamnya luar biasa. Kita punya energi fosil, punya sumber daya energi baru terbarukan, yang kita belum punya itu teknologinya. Jadi memang generasi muda ini harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif terkait dengan inovasi-inovasi, sehingga kedepannya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar,” ujar Arifin.

Disampaikan Arifin bahwa saat ini dunia sangat memberi perhatian pada perubahan iklim. Ini merupakan kesempatan bagi generasi muda untuk bisa berpartisipasi dalam melakukan perubahan lingkungan dan mendukung program-program menuju energi bersih terutama untuk Indonesia.

Dalam diskusi Energy Transitions G20 Youth Forum tersebut, EVP Technology and Engineering PT.PLN (Persero) Zainal Arifin menyampaikan bahwa pada saat ini tantangan energi di Indonesia adalah

transisi energi yang selain mengharuskan energi yang lebih bersih juga bagaimana menjadikan pengelolaan energi menjadi lebih smart. Menurutnya yang bisa mewujudkan hal tersebut adalah generasi muda saat ini.

"Kita punya PR bagaimana energi kita selain harus lebih green juga harus lebih smart. Kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama untuk menyelesaikan masalah baru, kita perlu breakthrough dan perlu innovation," ungkap Zainal.

Dalam kesempatan yang sama EVP Research and Technology Inovation PT. Pertamina Oki Muraza menyampaikan bahwa saat ini yang menjadi fokus adalah bagaimana kita sebagai negara bisa bertahan dalam perubahan zaman dan transisi energi ini. Menurutnya perlu dukungan generasi muda dalam pengembangan ide dan inovasi mewujudkan hal tersebut.

"Mimpi kita itu besar sekali, di 2050 kita ingin 31% atau sepertiga dari energi itu renewables. Pertamina memiliki beberapa kolaborasi bersama komunitas generasi muda, adik-adik bisa menghubungi Pertamina Foundation apabila ada ide-ide yang ingin di execute, dan juga kami bisa membantu apabila ada yg memiliki ide untuk dikembangkan menjadi bisnis start-up," ujar Oki.

Menteri Arifin lebih lanjut menjelaskan agar generasi muda bisa mengidentifikasi sumber-sumber energi bersih yang ada. Kemudian ini akan dijadikan dasar data untuk bisa membangun infrastruktur kelistrikan dan bisa memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat.

"Kita himpun semangat untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih besar, nyata, real yang memang bisa memberikan kontribusi maksimal untuk masyarakat. Sumber daya kita masih besar, masih menunggu kalian.

Bagaimana kita bisa mengoptimalkan untuk memberikan dampak "snowballing", makin lama makin besar manfaatnya untuk bangsa kita. Sekali lagi semangat!" tutup Arifin.

Tentang Energy Transitions G20 Youth Forum

Energy Transitions G20 Youth Forum merupakan salah satu ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi dalam mendorong transisi energi global. Kegiatan ini menghadirkan narasumber praktisi sektor energi serta perwakilan generasi muda Indonesia yang berkontribusi aktif dalam pengembangan energi bersih di tanah air.

Dalam acara ini terdapat beberapa agenda diantaranya Soft Launching Energy Transition Innovation Challenge yaitu kompetisi bagi generasi muda dibawah 25 tahun untuk unjuk ide dan inovasi pengembangan energi bersih. Kemudian Dukungan Program Inovasi Surya Power Solusi Energy (SuperSUN) PLN yang mengajak mahasiswa untuk terlibat langsung dalam melistriki desa terluar di Papua Barat dengan Micro-PLTS dan Battery Storage. Micro-PLTS tersebut dilengkapi online real time monitoring sehingga tidak membutuhkan operator khusus dan dapat dioperasikan hybrid dari sumber energi terbarukan. Biaya listrik dari inovasi SuperSUN diklaim hanya Rp2000,- per kWh atau lebih hemat 25 kali lipat dibanding genset. Pilot project SuperSUN sudah melistriki Kampung Yarweser, Raja Ampat sehingga dapat merasakan listrik 24 jam. Selanjutnya, SuperSUN akan diimplementasikan lebih dari 30 unit dengan melibatkan generasi muda.

Selain itu, ada juga agenda Dukungan Program Desa Energi Berdikari Pertamina yang mengajak generasi muda yang telah di edukasi melalui Kampus Merdeka-Gerilya, untuk ikut membangun desa dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses energi. Desa berdikari Pertamina bersama Pemerintah dan Society Of Renewable Energy akan membangun PLTS di berbagai lokasi, berbasis Community Involvement Development yang memberikan dampak ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dan agenda terakhir adalah Dukungan Program Desa Energi Berdikari Pertamina feat. GO-Gerilya yang merupakan kontribusi generasi muda Kampus Merdeka-Gerilya untuk membangun PLTS di tanah air. (U)



Laporan dari ETWG I:

PERAN NEGARA ANGGOTA G20 SANGAT STRATEGIS DALAM TRANSISI ENERGI

Energy Transitions Working Grup (ETWG) 1 dimulai Selasa (24/3/2022). Acara yang merupakan rangkaian acara presidensi G20 di Indonesia ini dihadiri 20 negara peserta dengan mengirimkan delegasi secara offline dan online untuk membahas masa depan energi dunia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam pembukaan ETWG menekankan pentingnya dukungan dari negara anggota G20 dalam proses transisi energi. Pasalnya 20 negara anggota G20 memberikan kontribusi terhadap kurang lebih 80% perekonomian dunia.

"Dalam ETWG ini menitikberatkan pada accessibility, teknologi, dan pendanaan, jadi bagaimana 20 negara anggota G20 yang memberikan kontribusi 80% perekonomian dunia ini bisa memberikan dukungannya," ujar Arifin.



Arifin menjelaskan pembahasan accessibility pada diskusi ETWG adalah bagaimana cara kita dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menikmati energi. Pembahasan lainnya adalah terkait pengembangan teknologi pendukung yang juga sangat dibutuhkan dalam memanfaatkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang reliable dan kompetitif. Arifin menjelaskan, proses transisi energi membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Untuk itu seluruh negara anggota G20 harus memberikan dukungannya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

Kementerian ESDM sekaligus Co-Chair ETWG Prahoro Yulijanto Nurtjahjo menyatakan, pelaksanaan ETWG kali ini dilaksanakan secara offline setelah 2 tahun sebelumnya dilaksanakan secara online. Delapan negara mengirimkan perwakilan secara fisik, yaitu Indonesia, Australia, Prancis, Jerman, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Sedangkan 12 negara lain mengirimkan delegasi secara online. Prahoro juga menyampaikan bahwa pelaksanaan diskusi ini menjadi pintu masuk Indonesia untuk berkontribusi dalam transisi energi. "Ini menjadi pintu masuk kita, terutama bagaimana kita bisa mensupport Net Zero Emission (NZE) dan perubahan iklim secara global," jelas Prahoro.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Dadan Kusdiana dalam pernyataan pers menyampaikan bahwa posisi Indonesia ingin memanfaatkan forum G20 ini untuk memberikan manfaat Indonesia sebesar-besarnya khususnya transisi menuju NZE.

"Tantangan kita ubah menjadi opportunity, kita tunjukkan bahwa Indonesia siap dari sisi regulasi, tunjukkan bahwa potensi besar di kita baik dari potensi sumber daya EBT maupun demand, dan kita siap memberikan sistem dan mekanisme investasi yang kondusif sehingga nanti kita bisa memastikan capaian target," ungkap Dadan.

Kerjasama Strategis Menuju Karbon Netral

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT. PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa Menteri ESDM telah memberi arahan untuk membangun visi yang jauh kedepan agar generasi masa mendatang bisa mendapatkan masa depan jauh lebih baik daripada generasi saat ini yaitu dengan mengurangi emisi GRK dari sektor ketenagalistrikan. Pihaknya telah mencanangkan beberapa program karbon netral sektor kelistrikan di tahun 2060.

"Perjuangan menghadapi tantangan perubahan iklim ini tidak bisa dijalankan sendirian, perlu suatu kolaborasi baik itu domestik maupun international. Rangkain G20 ini menjadi penanda bahwa dalam menghadapi tantangan global ini yang tadinya terfragmentasi menjadi unified," ujar Darmawan.

Hari pertama ETWG 1 ini, selain pembukaan dilakukan acara penandatanganan Kerjasama Strategis Menuju Net Zero Emission

2060. Dalam acara ini dilakukan beberapa agenda diantaranya penandatanganan MoU Pembiayaan Pembangunan dan Pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) PLTS Bali Barat (25 MWp) dan PLTS Bali Timur (25 MWp), penandatanganan PPA PLTM Kukusan (5,4 MW). Selain itu juga dilakukan penandatanganan Financial Close PLTM Sukarame (7 MW), penandatanganan Renewable Energy Certificate Partnership Agreement and Contract PT. PLN (Persero), dan penandatanganan MoU Asistensi Teknis dalam Meningkatkan Kualitas Standar Lingkungan dan Sosial Proyek Infrastruktur EBT antara Yayasan WWF Indonesia dengan PT. PLN (Persero).

Sebagai informasi, diskusi ETWG akan berlangsung dalam tiga tahap, yang pertama dilakukan di Yogyakarta, dilanjutkan diselenggarakan di Labuan Bajo pada bulan Juni 2022, dan yang ketiga akan dilakukan di Bali pada September 2022.

“Kita harapkan selesai dari program ini, sudah bisa dicapai kesepakatan bersama bagaimana kita mencapai NZE dan transisi mana yang kita jalani bersama, kerjasama apa yang kita harus lakukan,” tutup Arifin. (U)



Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam pembukaan ETWG di Yogyakarta, Jumat (25/3/2022).

Laporan dari ETWG I: PROGRAM DE DIESELISASI UNTUK ENERGI BERSIH

Program De-Dieselisasi atau mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) ke pembangkit yang lebih bersih menjadi perhatian pemerintah. Ditargetkan 5200 unit pembangkit listrik diesel di 2.130 lokasi berkapasitas 2,37 Giga Watt (GW) dialihkan ke pembangkit dengan energi bersih sesuai tiga skema yang disiapkan PT. PLN (Persero). Menteri ESDM Arifin Tasrif mengapresiasi upaya PT PLN (Persero) yang fokus mendukung program tersebut, salah satunya melalui kegiatan International Seminar Renewable Technology as Driver for Indonesia's De-Dieselization sebagai program yang mendorong transisi energi.

sistem terisolasi untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1.070 MW. Sementara, sisa PLTD berkapasitas 203 MW masih digunakan sebagai sistem black-start saat terjadi pemadaman.

Arifin mAgreement, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan National Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.



Hal tersebut disampaikan Arifin pada pembukaan seminar yang merupakan rangkaian Energy Transitions Working Group (ETWG) 1 Presidensi G20 Indonesia, Rabu (23/3). Kegiatan ETWG 1 ini dilaksanakan hingga Jumat (25/3/2022) yang dihadiri oleh delegasi peserta G20 dari berbagai negara.

Tiga skema yang disiapkan dalam program de-dieselisasi ini adalah (1) konversi PLTD menjadi PLT EBT berkapasitas 500 MW; (2) Konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke gas (gasifikasi) dengan kapasitas 598 MW; dan (3) Perluasan jaringan ke



Berdasarkan Road Map menuju Net Zero Emission (NZE) di 2060, strategi utama pemerintah adalah mengurangi emisi karbon pada sisi pembangkit dengan mengganti pembangkit listrik energi fosil dengan pembangkit listrik EBT, retirement secara berkala pembangkit-pembangkit yang menggunakan energi fosil, serta penggunaan teknologi rendah emisi seperti teknologi CCS/CCUS. Selain itu pada sisi demand yang digalakkan adalah penggunaan kompor listrik dan kendaraan listrik.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan PLN berkomitmen penuh untuk mengurangi emisi Co2 dengan tujuan agar generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik daripada generasi sekarang. Program de dieselisasi ini disebut Darmawan berpotensi mengurangi impor BBM serta menghemat devisa negara.

"PLN terus berkomitmen untuk melakukan transisi energi bersih di Tanah Air sebagai upaya menciptakan masa depan yang lebih baik. Selain itu, ini juga menjadi dukungan terhadap komitmen Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 untuk mewujudkan NZE 2060," kata Darmawan.



Dalam kesempatan yang sama Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdiharto menyebutkan, PLN mempunyai komitmen dalam mendukung dekarbonisasi untuk mencapai NZE pada tahun 2060, dalam jangka menengah PLN juga berkomitmen untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Berdasarkan RUPTL 2021-2030, target pembangunan EBT PLN mencapai 51,6 persen atau 20,9 GW pembangkit baru EBT, yang terdiri antara lain pembangkit hydro 10,4 GW, pembangkit geothermal 3,4 GW pembangkit solar fotovoltaik 4,7 GW dan energi terbarukan lainnya sebesar 2,5 GW.

"Pengembangan 4,7 GW fotovoltaik ini tentunya termasuk juga adalah program de dieselisasi ini yaitu berupa program konversi antara PLTD dengan PLTS secara hybrid," ujar Wiluyo.



Upaya PLN menyelenggarakan seminar internasional dalam rangkaian ETWG 1 ini disebut Arifin sebagai langkah yang patut diapresiasi. Menurutnya, pemerintah membutuhkan kolaborasi dari semua stakeholders terutama dalam hal pembiayaan dan bagaimana dapat mengembangkan infrastruktur untuk mendukung semua program.

"Saya mengapresiasi semua stakeholder yang berpartisipasi dalam program de dieselisasi. Hal ini merupakan langkah awal menuju energy bersih," tutup Arifin.

Selesai membuka seminar internasional ini, Arifin Tasrif bersama Darmawan Prasodjo dan ratusan peserta Energy Transitions Working Group (ETWG) mengikuti Parade Motor Konversi BBM ke Listrik. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana didapuk sebagai pengibar bendera start. Parade yang diikuti lebih dari seratus kendaraan listrik dari hotel Royal Ambarukmo ke venue acara di Sheraton Hotel ini sebagai penanda pembukaan ETWG 1 Presidensi G20 di Yogyakarta, 23-25 Maret 2022. (AT)





KAJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA >>>

NARASUMBER



Gigh Udi Atmo, S.T., M.EPM., Ph.D

ASN Ditjen Ketenagalistrikan

Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya
Koordinator Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan

Luky, S.T., M.T.

ASN Ditjen Ketenagalistrikan

Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya

NARASUMBER - PENANGGAP



Prof. Dr.Ir. Iwa Garniwa Mulyana K. MT

Rektor Institut Teknologi PLN



Host

Ridwan Budi Santoso, S.T.,

ASN Ditjen Ketenagalistrikan

DORONG PARTISIPASI PUBLIK, DITJEN GATRIK GELAR BEDAH PAPER KAJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA

Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik untuk memberikan masukan terkait jual beli tenaga listrik lintas negara, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) menggelar bedah paper pada Kamis, 7 April 2022. Plt. Sekretaris Ditjen Gatrik Ida Nuryatin Finahari menyampaikan hal tersebut saat membuka Bedah Paper berjudul “Kajian Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara”.

“Diskusi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah maupun para pelaku usaha dalam menyusun kebijakan, perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan kegiatan jual beli tenaga listrik lintas negara,” ujar Ida. Ia menyebut paper ini secara ringkas membahas tentang kajian strategis kegiatan jual beli tenaga listrik lintas negara, khususnya ekspor tenaga listrik dari Indonesia ke Singapura, yang ditinjau berdasarkan aspek regulasi maupun aspek tekno ekonomis.

“Pemilihan judul paper ini sangat relevan dengan isu tentang kajian geopolitik ekspor listrik ke Singapura yang sedang menjadi pembahasan secara intensif dalam pengambilan kebijakan di sektor ketenagalistrikan,” tuturnya.

Penulis paper sekaligus narasumber dalam Bedah Paper ini adalah Koordinator Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan Gigih Udi Atmo dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya Luky. Untuk menggali lebih dalam dan komperhensif dari sisi akademisi maupun dari sisi praktisi terkait paper ini, acara ini juga menghadirkan Rektor Institut Teknologi PLN Iwa Garniwa sebagai penanggap.

Gigih menjelaskan permodelan pembangkit listrik rendah karbon pada ASEAN Power Grid yang terintegrasi. Mengawali paparannya, ia mengatakan salah satu tujuan dari permodelan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana interkoneksi jaringan transmisi regional menguntungkan masing-masing negara untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi dan mengurangi emisi CO₂.

“Tingginya carbon price mempengaruhi pemilihan pembangkit listrik dan mendorong jual beli tenaga listrik lintas negara, dan tingkat emisi akan turun menjadi sebsar 719 MtCO₂ atau 22% lebih rendah dari Skenario Dasar,” Gigih menjelaskan.

Melengkapi Gigih, Luky menyampaikan pentingnya interkoneksi antar negara ASEAN melalui ASEAN Power Grid.

“Interkoneksi ini diperlukan untuk memanfaatkan potensi EBT (energi baru terbarukan-red) yang besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal karena jarak geografis yang jauh dari pusat

beban, maupun keterbatasan demand negara setempat sehingga dapat terbentuk sistem tenaga listrik interkoneksi yang andal, bersih, dan saling menguntungkan,” ujar Luky.

Menanggapi kajian mengenai jual beli tenaga listrik negara, Iwa menyebut topik tersebut sangat menarik tapi penuh dengan tantangan. Ia menyebut ekspor impor ini adalah sesuatu yang harus dilakukan secara bijak dan cerdas.

“Kalau bisa kita mengeksport karena kita termasuk negara kaya. Bukan kaya fosil, tapi kaya akan energi terbarukan,” kata Iwa.

Bedah Paper kali ini merupakan acara kedua yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Ditjen Gatrik, setelah Bedah Paper pertama pada September 2021. Kegiatan ini menjadi sarana sharing knowledge dari pegawai Ditjen Gatrik untuk berbagi ilmu melalui karya tulisnya. Melalui acara ini pula, Perpustakaan Ditjen Gatrik ingin mengajak para pegawai dan masyarakat umum untuk meningkatkan literasi, informasi, serta sarana pengetahuan di bidang ketenagalistrikan. (AMH)



PRESIDEN JOKOWI

Resmikan SPKLU Ultra Fast Charging Pertama di Indonesia

Dalam rangka mendukung operasional kendaraan delegasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (G20) di Bali pada Oktober 2022 nanti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan tipe ultra fast charging pertama di Indonesia. Peresmian dilaksanakan di Sentral Parkir ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (25/03/2022).

Hadirnya mobil listrik sebagai kendaraan resmi delegasi negara-negara G20 disebut Jokowi menjadi wujud komitmen Indonesia mendukung transisi energi. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat meresmikan. Presidensi G20 disebut Jokowi sebagai kesempatan emas Indonesia untuk menunjukkan komitmen dalam pengurangan emisi melalui penggunaan mobil listrik selama KTT berlangsung.

"Melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20 juga sekaligus sebagai showcase bahwa negara kita negara Indonesia menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik," ucap Jokowi.

Melalui presidensi G20 ini, Jokowi ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia tengah tumbuh dan berkembang cepat. Percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik disebut Jokowi sebagai bagian dari desain besar pemerintah dalam melaksanakan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT).

Presiden mengapresiasi PLN yang telah menyiapkan 60 SPKLU Ultra Fast Charging 200KW, dan 150 titik fasilitas home charging untuk mendukung KTT G20. SPKLU Ultra Fast Charging disebut memiliki keunggulan pengisian sangat cepat dan fitur distribusi dinamis sehingga dapat mengisi dua mobil sekaligus. Lokasi SPKLU tersebut antara lain akan ditempatkan di Bandara Ngurah Rai, Kempinski, Bali Nusa Dua Convention Center, Bali Turtle Island Development, Mangrove Tahura, Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, dan 14 hotel penginapan para kepala negara.

Dalam peresmian tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa PLN siap mendukung pemerintah dengan menyiapkan infrastruktur dan kendaraan operasional



Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Sentral Parkir ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (25/03/2022).

“ Melalui penggunaan mobil listrik selama KTT G20 juga sekaligus sebagai showcase bahwa negara kita negara Indonesia menjadi negara terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik

Joko Widodo

dari kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sebagai etalase aksi pengurangan emisi karbon.

“Untuk jangka panjang, infrastruktur ini kami sediakan tak hanya untuk pertemuan KTT G20, tetapi juga memang kami masifkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam penggunaan kendaraan listrik,” ujarnya dikutip dalam laman resmi PLN.

Pembangunan 60 unit SPKLU ultra fast charging 200 kilo watt (kW) untuk pengisian listrik 656 unit kendaraan listrik membutuhkan investasi senilai Rp 72,84 miliar. Dengan SPKLU ultra fast charging ini, pengisian daya mobil listrik hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit per kendaraan.

Selain membangun SPKLU Ultra Fast Charging, PLN juga membangun 21 unit SPKLU fast charging serta menyediakan 150 unit home charging sebagai bentuk dukungan terhadap KTT G20. Darmawan mengatakan SPKLU ultra fast charging dan home charging telah memiliki renewable energy certificate /REC atau sertifikasi energi terbarukan. (PSJ)





Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana pada Pengambilan Sumpah/Janji Dan Pelantikan Pejabat Fungsional, Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2022, dan SK Pensiun Di Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, di Jakarta, Senin (28/3/2022).

Lantik 10 Pejabat Fungsional, INI PESAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Dari sisi peningkatan mentalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mempunyai 3 pegangan yaitu karakter, kompetensi dan kapabilitas. Hal tersebut disampaikan pada Pengambilan Sumpah/Janji Dan Pelantikan Pejabat Fungsional, Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2022, dan SK Pensiun Di Lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, di Jakarta, Senin (28/3/2022).

"Ketiganya saya pegang betul, dan kalau dipilih mana yang saya tentukan adalah karakternya. Itu menjadi catatan penting untuk menjadi ASN yang berintegritas," ujar Rida.

Rida menjelaskan untuk transformasi jabatan dan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2019, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permen PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan

melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.

Hingga tahun 2021, instansi pemerintah telah menyelesaikan penyederhaan struktur organisasi menjadi 2 (dua) level dan melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

"Penyederhanaan birokrasi tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan mengalihkan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional, namun juga dilakukan melalui perubahan sistem kerja," kata Rida.

Perubahan yang dilakukan merupakan transformasi sistem kerja yang semula berjenjang dan silo berubah menjadi sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis. Bentuk dari transformasi sistem kerja tersebut menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan digital.

“Dukungan tata kelola pemerintahan melalui sistem kerja tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian kinerja bersama yang unggul,” ujar Rida.

Dalam Permen PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2022, mekanisme kerja dalam instansi pemerintahan dilaksanakan dengan prinsip orientasi pada hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaboratif, transparansi, dan akuntabel.



Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas, sesuai dengan jenjang jabatan fungsionalnya. Dalam pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan. Penugasan secara individu dan/atau tim kerja tersebut dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.

“Jadi ini benar-benar membentuk tim kerja yang multi disiplin, multi kompetensi untuk menuju atau mencapai target yang telah ditentukan,” kata Rida.

Pada lingkup pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, instansi pemerintah mengutamakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi dalam mendukung sistem kerja instansi pemerintah dengan integrasi Data Center (DC) dan Data Recovery Center (DRC) serta pemanfaatan aplikasi berbagai pakai seperti cloud, shared drive, dan data sharing.

Penyesuaian sistem kerja dilakukan dengan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan penyesuaian standar operasional prosedur, yang masing-masing diatur dalam Permen PAN & RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Rida menjelaskan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi meluncurkan Core Values “BerAKHLAK” dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) “Bangga Melayani Bangsa” pada tanggal 27 Juli 2021.

Peluncuran Core Values bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar (core values) bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Core values BerAKHLAK yang dimaksud merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Dengan Core Values diharapkan agar setiap ASN memiliki kompas perilaku yang sama, guna mewujudkan SDM yang memiliki profil pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK sehingga menghasilkan kinerja tinggi yang pada akhirnya bermuara pada pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Rida.

Jumlah PNS yang dilantik saat ini sebanyak 10 orang, yang terdiri dari 1 Pranata Humas Madya, 1 Pranata Humas Muda, 2 Analis Hukum Muda, 1 Analis Hukum Pertama, 1 Perencana Ahli Pertama, 3 Analis Kepegawaian Ahli Pertama, 1 Perencana Ahli Muda. Kemudian, sebanyak 15 orang menerima Keputusan Kenaikan Pangkat PNS.

Rida juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap dua PNS purnabakti Ditjen Ketenagalistrikan, “Terima kasih sebanyak-banyaknya, atas pengabdian dan loyalitas yang telah diberikan selama ini dalam melaksanakan tugas, serta atas dedikasi, kedisiplinan tanpa cela hingga masa pensiun tiba,” ujar Rida.

Rida berpesan agar setiap bekerja lakukan dengan baik, benar, dan berkah. “Selalu lakukan seperti itu, ada rasa kesadaran diri setiap bekerja itu bagian dari pada ibadah, insyallah semuanya bisa dilalui dengan lancar,” tutup Rida. (AT)



PEMERINTAH DORONG PLTS ATAP PENUHI KEBUTUHAN INDUSTRI

Persaingan pasar global sudah bergeser dari produk konvensional ke produk energi hijau yang lebih ramah lingkungan. Pemanfaatan teknologi industri pun mulai beralih ke green technology dan green industry. Untuk itu pemerintah mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan menerbitkan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 sebagai bentuk komitmen pemerintah mewujudkan energi bersih.



Hal tersebut disampaikan Direktur jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana saat memberikan kuliah umum Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (GERILYA) secara daring, Kamis (17/03/2022).

Menurut Rida, sektor industri dan bisnis menjadi sektor yang potensial untuk mempercepat penetrasi energi terbarukan. Tuntutan pasar yang semakin kuat akan produk hijau (green product) mendorong sektor komersial dan industri beralih pada teknologi yang ramah lingkungan demi mempertahankan eksistensinya di pasar global.

Menurutnya saat ini ada standar baru di bidang industri untuk menghasilkan produk-produk yang green agar bisa diekspor ke negara lain. Saat produk tersebut sampai di negara lain, akan diklasifikasi kembali apakah saat produksinya menggunakan energi yang berasal dari pembangkit yang emisinya tinggi. Apabila demikian akan dikenakan pajak yang tinggi terhadap barang tersebut.

Direktur jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana memberikan kuliah umum Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya (GERILYA) secara daring, Kamis (17/03/2022).

“Artinya, meskipun dari pabrik kita murah, tetapi kemudian karena dikenai pajak, barang kita itu tidak bisa bersaing” ujar Rida.

Industri di Indonesia disebut Rida mulai meminta dipasok dengan listrik yang green. Untuk itu industri-industri berinisiatif untuk membangun sendiri PLTS atap dengan memanfaatkan atas atapnya yang luas.

di antaranya berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah saat ini juga sedang menyusun beberapa tahapan Road Map Pengembangan PLTS Atap, “Lagi kita upayakan terealisasi agar kemudian permen efektif memberikan dampak yang lumayan signifikan,” ungkap Rida.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Kementerian ESDM untuk mempercepat

pengembangan PLTS Atap antara lain menyiapkan aplikasi pelayanan,

pelaporan, hingga menyediakan posko pengaduan. Kementerian ESDM juga mendekati perbankan untuk ikut berkontribusi menyediakan dana murah dan bekerjasama dengan institusi luar negeri agar Road Map PLTS Atap bisa dicapai.

Salah satu upaya mempercepat PLTS Atap juga dengan membentuk program GERILYA dengan melibatkan generasi muda dalam pemanfaatan energi bersih khususnya PLTS Atap. Program ini melibatkan Kementerian ESDM dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan studi independen PLTS Atap yang diimplementasikan dalam metode “Merdeka Belajar Kampus Merdeka”. Tahap ini program gerilya ditujukan bagi 50-100 Mahasiswa Eksakta minimal semester-5 di berbagai Kampus di Indonesia.

Keunggulan Program GERILYA yaitu kolaborasi antar Kementerian, BUMN, Akademisi, Asosiasi, NGO dalam mendorong energi bersih, dengan kontribusi pengajar mulai dari top leader Birokrat, CEO BUMN, dosen hingga praktisi profesional. Program GERILYA dimulai pada Februari 2022 s.d. Juli 2022 mencakup Courses dan Team Based Project. (AT)

Mereka bisa mengklaim sebagian produk mereka diproduksi dengan menggunakan energi yang green, dalam hal ini adalah PLTS Atap. Presiden Jokowi disebut Rida juga berkali-kali menyampaikan terkait isu Gas Rumah Kaca (GRK).

“Terakhir pada pidato Presiden pada tanggal 16 agustus 2021, yang menjadi pegangan kita, dan kemudian keluarlah Permen PLTS Atap,” ungkap Rida.

Program GERILYA akselerasi PLTS Atap

Pemerintah terus mendorong pembangunan PLTS Atap untuk mencapai target 3,6 Gigawatt (GW) pembangkit EBT di tahun 2025. Penerapan PLTS Atap disebut memiliki sejumlah dampak positif,





Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar dalam acara Market Review "Nomor Identitas Instalasi Listrik, Jaminan Keamanan Instalasi Listrik" yang diselenggarakan oleh IDX Channel di Jakarta pada Jumat, (18/03/2022).

ANALOGI NIDI SEBAGAI "AKTA LAHIR" INSTALASI LISTRIK

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerapkan Nomor Identitas Instalasi Listrik (NIDI) sebagai prasyarat permohonan Sertifikat Laik Operasi dalam proses pemasangan listrik. NIDI dianalogikan sebagai "Akta Lahir" yang didapatkan oleh masyarakat setelah memasang instalasi listrik melalui instalatir resmi dan berizin. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar dalam acara Market Review "Nomor Identitas Instalasi Listrik, Jaminan Keamanan Instalasi Listrik" yang diselenggarakan oleh IDX Channel di Jakarta pada Jumat, (18/03/2022).

"Analoginya itu NIDI seperti akta lahir, dalam identitas ini terdiri dari siapa pemilik instalasi, lokasinya dimana, jenis instalasinya apa misalnya pembangkit atau rumah tinggal, dan kemudian gambar instalasi," ujar Wanhar.

Dijelaskan Wanhar bahwa gambar instalasi menjadi yang paling penting dalam melakukan verifikasi apakah persyaratan teknis sesuai kaidah keselamatan ketenagalistrikan sudah dapat dipenuhi. Dengan gambar instalasi tersebut dapat dilihat apabila ada yang kurang sesuai maka dapat diperbaiki, juga berisi detail seperti berapa titik lampu dan berapa jumlah kotak kontak yang dipasang. Gambar ini juga dapat menjadi gambaran ketika kedepan akan melakukan renovasi untuk kembali menyambung instalasi listriknya.

NIDI merupakan nomor identitas yang dikeluarkan Kementerian ESDM untuk instalasi listrik yang telah selesai dipasang atau dibangun oleh pelaku usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi listrik yang memiliki perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan. Dalam NIDI berisi informasi lokasi dan tanggal selesai pemasangan instalasi listrik, informasi badan usaha pemasangan instalasi listrik, spesifikasi komponen terpasang, hingga gambar instalasi listrik.

"Penerbitan NIDI tidak menetapkan tarif, jika ada tarif yang timbul hal tersebut adalah biaya untuk jasa pembangunan dan pemasangan atau biaya supervisi seperti identifikasi, verifikasi lapangan, dan evaluasi instalasi listrik yang telah terpasang oleh instalatir pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik," jelas Wanhar.

Lebih lanjut Wanhar menjelaskan, dengan penetapan NIDI diharapkan masyarakat semakin lama semakin sadar agar tidak lagi asal memilih instalatir, karena pemasangan listrik yang dilakukan oleh instalatir yang tidak resmi dan berizin tidak dapat menjamin keselamatan ketenagalistrikannya.

"Ini challenge pemerintah, harus meningkatkan pemahaman masyarakat, agar instalasi listrik dipasang oleh yang ahli di bidangnya untuk mengurangi kebakaran akibat listrik karena instalasi listrik yang tidak standar," tutup Wanhar. (U)

DUKUNG TRANSISI ENERGI, ESDM KONVERSI 1.000 MOTOR BBM KE MOTOR LISTRIK



Menteri ESDM Arifin Tasrif memantau motor BBM yang dikonversi menjadi motor listrik dalam Seremoni Program Konversi Sepeda Motor Penggerak BBM menjadi Motor Listrik, Kamis (17/3/2022), di Jakarta.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan konversi 1.000 motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik pada tahun 2022. Program konversi ini ditargetkan mencapai 13 juta motor listrik pada 2030. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap transisi energi serta strategi dalam akselerasi menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan hal tersebut dalam Seremoni Program Konversi Sepeda Motor Penggerak BBM menjadi Motor Listrik, Kamis (17/3/2022), di Jakarta.

“Inisiatif ini dimulai sejak dua tahun lalu di mana dicoba 10 unit sepeda motor BBM untuk menjadi motor listrik. Percobaan ini menggunakan komponen-komponen apa yang ada di pasar. Kemudian kita berpikir ke depan bahwa dengan Program Transisi Energi yang saat ini kita rancang, pada 2060 kita berusaha mencapai NZE dan khususnya sektor transportasi memberikan peran sangat penting karena saat ini masih menggunakan energi fosil,” ujar Arifin.

Tak hanya mendukung transisi energi, Arifin menyampaikan program ini juga untuk mewujudkan penggunaan energi yang lebih bersih, efisien, mengurangi impor BBM, menghemat devisa serta dapat menghemat subsidi BBM.

Sebelumnya, Kementerian ESDM berhasil melaksanakan konversi 100 unit motor BBM menjadi motor listrik. Pelaksana jasa konversi atau modifikasi pelaksanaan program konversi ini adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) yang kini menjadi Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan dan EBTKE.

Selain menumbuhkembangkan industri hulu serta industri baterai dan komponennya, Arifin juga berharap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat terlibat dalam program konversi ini melalui bengkel konversi UMKM.

“Diharapkan penggunaan kendaraan listrik menjadi lebih masif dan lebih terjangkau sekaligus membuka kesempatan bekerja melalui bengkel konversi UMKM serta meningkatkan produksi komponen lokal. Program ini diharapkan semakin mendorong ekosistem KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai-red) secara nasional,” Arifin menuturkan.

Tak hanya melibatkan UMKM, Kementerian ESDM juga menggandeng Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia, PT PLN (Persero), dan PT Pertamina untuk mendukung program konversi. Menurut Arifin, PLN dan Pertamina berkomitmen memberikan masing-masing 500 motor untuk dikonversi pada tahun ini.

“Ke depan kita akan memulai dulu dari Jakarta, kemudian ke daerah-daerah. Tinggal bagaimana kesiapan support baterai ke depan. Untuk bisa merealisasikan ini perlu dukungan dan kerja sama dari seluruh instansi,” ujarnya.

Arifin menyebut Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat dan Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor telah melakukan pengujian serta penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sepeda motor hasil konversi. Arifin juga mengapresiasi Kepolisian RI untuk kemudahan proses perubahan STNK, BPKB dan tanda nomor kendaraan bermotor. Acara ini diakhiri dengan parade 30 motor listrik hasil konversi di kawasan Monas. (AMH)



Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT Poso Energy yang berkapasitas 515 MW dan PLTA Malea Energy dengan kapasitas 90 MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (25/02/2022).

PRESIDEN JOKOWI

RESMIKAN PLTA POSO ENERGY DAN MALEA ENERGY



Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT Poso Energy yang berkapasitas 515 MW dan PLTA Malea Energy dengan kapasitas 90 MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (25/02/2022).

Jokowi menyampaikan, pembangunan pembangkit listrik ini akan mendukung proses transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Ia menyampaikan bahwa saat ini semua negara didorong untuk bergeser dari pemakaian energi fosil utamanya batu bara menuju ke energi hijau.

“Pagi hari ini saya sangat senang sekali karena kita semuanya akan meresmikan sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang itu adalah berarti energi hijau, berarti adalah EBT (energi baru terbarukan),” ujar Jokowi.

Indonesia, disebut Jokowi memiliki potensi energi yang mencapai 418 gigawatt, baik berupa hydropower, geotermal, tenaga surya, angin, tidal, hingga panas permukaan air laut. "Semuanya ada di negara kita. Hanya bagaimana kita bisa menggeser dari yang coal/batu bara ini kepada energi hijau ini juga bukan pekerjaan yang mudah karena sudah terlanjur banyak sekali PLTU-PLTU kita," ujarnya.

Jokowi mengapresiasi sektor usaha yang membangun sumber EBT seperti di PLTA di Poso dan Tana Toraja ini. Ia mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh Kalla Group dalam hal membangun hydropower, baik yang ada di Sulawesi Tengah yang nanti juga akan selesai, di Mamuju, dan di Kerinci.

Menurut Jokowi, pemanfaatan sumber energi baru terbarukan yang berpotensi besar di Indonesia terus didorong untuk mewujudkan nol emisi pada 2060. Jokowi menekankan, birokrasi perizinan energi baru terbarukan juga terus dipersingkat sehingga pembangunan pembangkit listrik EBT dapat dipercepat.

"Target-target seperti ini yang tidak mudah dikejar karena memang antara pertumbuhan, permintaan, dan pertumbuhan listrik harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada kelebihan pasok dari PLN sehingga membebani PLN," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta PLN memperhatikan persoalan pemberian iin bagi PLTA. Birokrasi agar dibenahi agar proses perizinan tidak memakan waktu bertahun-tahun.

"Yang ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi, utamanya di PLN itu betul betul, Pak Dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi," tegas Jokowi.

Sekilas Tentang PLTA Poso dan Malea

PLTA Poso dibangun oleh PT Poso Energy dengan skema IPP melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) pada tahun 2007. PLTA eksisting memiliki kapasitas awal yaitu 3 x 65 MW dan telah beroperasi sejak tahun 2012. Pada tahun 2017, ditandatangani PJBL ekspansi dimana total kapasitas menjadi 515 MW dan fungsinya beralih sebagai PLTA Peaker, yang memasok kebutuhan sistem saat beban puncak.

Sementara itu PLTA Malea dibangun oleh PT. Malea Energy dengan skema IPP melalui penandatanganan PJBL pada tahun 2015, memiliki kapasitas yaitu 2 x 45 MW dan telah beroperasi sejak tahun 2021. (AT)



Tambahan pembangkit setelah 2030 hanya dari EBT. Mulai 2035 didominasi oleh Variable New Energy (VRE) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pada tahun berikutnya diikuti oleh Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL).



pemanfaatan teknologi rendah emisi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

"Dari sisi demand, strategi yang dilakukan antara lain pemanfaatan kompor listrik dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), di samping penerapan manajemen energi," sebutnya.

Arifin lantas menyampaikan teknologi super grid dan smart grid menjadi kunci untuk meningkatkan penetrasi EBT. Menurutnya, pengembangan super grid dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarsistem kelistrikan antarpulau untuk berbagi sumber EBT.

Pemerintah juga memiliki rencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya EBT untuk pembangkit listrik, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang direncanakan masuk pada 2049.

"Tambahan pembangkit setelah 2030 hanya dari EBT. Mulai 2035 didominasi oleh Variable New Energy (VRE) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pada tahun berikutnya diikuti oleh Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik

INI STRATEGI PEMERINTAH MULUSKAN PETA JALAN TRANSISI ENERGI MENUJU KARBON NETRAL

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuat peta jalan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) di sektor energi. Peta jalan yang menjadi bentuk komitmen bersama antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan ini berupa timeline yang terbagi menjadi 6 tahap, dimulai pada 2021 hingga 2060.

Dalam Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR pada Kamis (17/2/2022) di Jakarta, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan strategi yang dilakukan untuk mencapai target NZE pada 2060 dalam peta jalan tersebut. Menurut Arifin, strategi disusun dari sisi supply maupun demand.

"Berdasarkan peta jalan transisi energi, strategi utama yang disusun untuk menuju karbon netral di sisi supply adalah pengembangan energi baru terbarukan (EBT) secara masif dengan fokus pada tenaga surya, hydro, panas bumi dan hidrogen," ujar Arifin.

Ia menambahkan, strategi lainnya dari sisi supply adalah retirement PLTU yang dilakukan secara bertahap, serta

Tenaga Arus Laut (PLTAL)," tegasnya.

Arifin tak menampik bahwa pada periode transisi energi, energi fosil masih memiliki peran penting untuk dikembangkan sebelum energi yang lebih bersih tersedia.

"Saat ini minyak bumi masih sebagai energi utama di sektor transportasi sebelum digantikan oleh kendaraan listrik. Gas bumi dapat dimanfaatkan untuk energi transisi sebelum EBT 100% di pembangkit. Untuk itu Kementerian ESDM tetap mendorong peningkatan produksi migas," Arifin menjelaskan.

Dalam kesempatan tersebut, Arifin juga mengemukakan peran serta Kementerian ESDM dalam Forum Transisi Energi G-20. Ia mengatakan tema utama Transisi Energi G-20 dilandaskan pada tiga hal yakni pengamanan aksesibilitas energi, peningkatan teknologi bersih dan cerdas, serta peningkatan pendanaan energi. (AMH)

KEMENTERIAN ESDM

PASTIKAN KEBUTUHAN LISTRIK CUKUP DAN ANDAL UNTUK MOTOGP



Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) memastikan suplai listrik pada seluruh kawasan Mandalika dilayani dengan andal sebelum dioperasikan. (9/2/2022).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kebutuhan listrik tercukupi dan andal untuk MotoGP 2022 yang akan segera digelar di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik), Kementerian ESDM berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) sehingga tidak ada byar pet untuk event internasional tersebut yang akan dimulai dengan kegiatan pre-season tanggal 11-13 Februari 2022 dan MotoGP season tanggal 18-20 Maret 2022.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu berharap PLN agar lebih intensif berkoordinasi dengan PT Indonesia Tourism Development Cooperation (ITDC) selaku penyelenggara, kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya untuk memastikan suplai listrik pada seluruh kawasan Mandalika dilayani dengan andal.

“PLN juga agar memastikan kelayakan seluruh instalasi listrik sebelum dioperasikan,” ujar Jisman di Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Sebelumnya, untuk memastikan kesiapan pasokan dan keandalan listrik dalam penyelenggaraan MotoGP, Jisman telah melakukan kunjungan lapangan ke Mandalika pada tanggal 2-4 Februari 2022. Jisman mengawali kunjungannya dengan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Tim Ditjen Ketenagalistrikan, Inspektur Ketenagalistrikan, ITDC sebagai pengelola sirkuit Mandalika, serta PLN.

“Salah satu hal yang menentukan kesuksesan suatu event, baik nasional maupun internasional dapat berjalan baik adalah listrik. Untuk itu, kami harus memastikan kesiapan instalasi listrik MotoGP sudah siap”, Jisman menyampaikan.

Dalam kunjungan tersebut, Jisman menyaksikan langsung skema kelistrikan dan juga skenario Zero Down Time (ZDT) yang telah disiapkan PLN. Pada saat kunjungan juga dilakukan inspeksi lebih detail pada instalasi tenaga listrik yang memasok ke Sirkuit Mandalika, serta uji kesiapan back up menggunakan genset dan Uninterruptible Power Supply (UPS).

“Kami mengapresiasi skema Zero Down Time yang disematkan oleh PLN NTB. Skema ini mengedepankan layanan listrik yang andal yang menjamin suplai listrik aman dengan skenario berlapis yang didukung komponen teknologi memadai,” tutur Jisman.

Untuk gelaran MotoGP, PLN akan menyuplai sirkuit melalui tiga jalur utama listrik, yakni dua jalur dari Gardu Induk (GI) Kuta dan satu jalur dari GI Sengkol. Dua jalur Saluran Kabel Tegangan Menengah sepanjang 1.485 kms dari GI Kuta dan satu jalur sepanjang 13.8 kms dari GI Sengkol telah selesai terbangun.

Di samping itu, PLN telah menyiapkan peralatan pendukung yakni genset 18 unit, UPS mobile 19 unit, trafo 11 unit dan Automatic Transfer Switch (ATS) 16 unit. Terkait personel dan sarana, telah disiapkan 104 petugas piket, 280 personil pelayanan teknik, 47 unit mobil, dan 12 unit motor. (AMH)



Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menghadiri pertemuan *Special Senior Officials' Meeting on Energy (SOME)* secara daring pada Rabu-Kamis, 26-27 Januari 2022.



DITJEN GATRIK

BERPARTISIPASI DALAM SPECIAL SENIOR OFFICIALS' MEETING ON ENERGY (SOME) 2022

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menghadiri rangkaian pertemuan Special Senior Officials' Meeting on Energy (SOME) yang dilaksanakan secara daring pada Rabu-Kamis, 26-27 Januari 2022. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia merespon permintaan klarifikasi Filipina terkait kebijakan pelarangan ekspor batu bara yang berlaku pada 1-31 Januari 2022.

"Kebijakan tersebut bersifat sementara guna menjamin ketersediaan pasokan untuk pembangkit listrik dalam negeri dan mengantisipasi kondisi cuaca ekstrem di musim penghujan. Larangan ekspor pada pekan awal berlaku kepada seluruh produsen dan transportasi/pengangkut batubara," Jisman menjelaskan.

Ia menambahkan Pemerintah Indonesia lantas melonggarkan pelarangan ekspor setelah mempertimbangkan pasokan stockpile batubara di pembangkit listrik yang semakin tinggi dan diperkirakan akan cukup untuk periode waktu yang tertentu. Pemerintah memberi izin kepada beberapa produsen dan pengangkut batubara yang telah memenuhi DMO (Domestic Market Obligation) periode tahun 2021.

"Tercatat, hingga pekan ketiga Januari 2022, terdapat 139 perusahaan telah mendapatkan izin untuk melanjutkan kontrak ekspornya karena telah memenuhi komitmen DMO pada tahun 2021," ujarnya.

Pertemuan Special SOME 2022 dibuka dan dipimpin oleh Pengiran Jamra Weira bin Pengiran Haji Petra, Senior Official on Energy (SOE) Leader Brunei Darussalam didampingi oleh Victor Jona SOE Leader Kamboja sebagai Vice Chairman. Special SOME merupakan pertemuan tahunan para pejabat tinggi energi ASEAN dengan mitra wicara dan organisasi internasional yang relevan. Tuan rumah Special SOME tahun ini adalah Brunei Darussalam.

Dari 10 kegiatan prioritas keketuaan Brunei Darussalam tahun 2021, 7 kegiatan telah terselenggara, 2 kegiatan masih berlangsung, dan 1 kegiatan akan menjadi prioritas periode selanjutnya oleh Kamboja. Kegiatan itu akan dilaksanakan oleh Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA)/ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC). Kamboja selaku ketua kerjasama energi ASEAN menyampaikan 5 prioritas tahunan termasuk 3 yang sedang dan belum terselenggara pada periode sebelumnya.

Special SOME 2022 juga membahas rencana kerjasama ASEAN menuju Karbon Netral dan upaya dekarbonisasi menyusuli inisiatif dari forum ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF). Pertemuan tingkat menteri antar forum AMEM dan AMAF direncanakan akan berlangsung di sela pertemuan tingkat menteri ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Minister/AEM Council) pada bulan September 2022.

Dalam agenda ASEAN Centre for Energy (ACE) Governing Council, ACE menyampaikan beberapa capaian sebagai berikut:

- bidang ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2016-2025 berupa nilai keseluruhan 3.45 dari 5,
- bidang Modelling, Policy Planning berupa publikasi jurnal internasional (1 approved) dan policy brief (7 report),
- bidang Renewable Energy, Efficiency and Conservation berupa jurnal internasional (1 approved) dan policy brief (1 report),
- bidang Power, Fossil Fuel, and Storage berupa policy brief (5 report) dan 1 buku. (AMH)

TRANSFORMASI ENERGI, INDONESIA BELAJAR DARI KISAH SUKSES HAWAII



image by Freepik

Dalam upaya mencapai target green energy sesuai Paris Agreement, pemerintah terus mendorong transformasi energi di Indonesia dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Salah satu upaya nya adalah dengan belajar dari pengalaman negara lain dalam proses transmisi energi. Kali ini, Indonesia belajar dari Hawaii yang telah sukses transformasi energi dari fosil ke EBT.

Koordinator Kerjasama Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Senda Hurmuzan Kanam menyampaikan hal tersebut dalam acara Webinar Energy Transition in the Electricity Sector in Hawaii yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bersama United States Agency for International Development (USAID) dan The Hawai'i Natural Energy Institute (HNEI) secara online di Jakarta, (2/2/2022).

“Degan diselenggarakan webinar ini, kita bisa belajar dari kisah sukses Hawaii dalam transformasi energi. Indonesia dan Hawaii memiliki kesamaan geografis yaitu banyak pulau yang tersebar dan isolated grids,” ungkap Senda mewakili Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan.

Pencapaian Hawaii terhadap transformasi energi menjadi EBT dengan

memanfaatkan energi angin dan matahari disebut Senda, tidak lepas dari dampak biaya Variabel renewable Energy (VRE) yang terjangkau dan kompetitif. Hal ini bisa menjadi pendekatan yang relevan untuk diterapkan sebagai program dedieselisasi di wilayah tertentu yang tetap memanfaatkan BBM seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), atau wilayah lain yang masih menggunakan gas seperti Batam.



image by Freepik

Penerapan konsep transformasi dari energi fosil ke EBT tidak hanya meningkatkan bauran energi terbarukan tetapi juga diharapkan dapat mengurangi biaya pokok penyediaan (BPP). Namun, penetrasi VRE yang besar seperti sistem di Hawaii yang mencapai 30%, akan dihadapkan tantangan baru terhadap keandalan sistem.

“Kami sangat berdedikasi untuk mendukung pemerintah Indonesia,” ungkap Andre.

Webinar yang diselenggarakan selama tiga hari pada 2-4 Februari 2022 ini membantu memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Amerika Serikat dan akan menciptakan peluang untuk mengembangkan kemitraan baru di sektor energi.



“Jadi, kita harus mempelajari penyusunan regulasi terapan, standar dan grid code sehingga kita tidak akan mengganggu keandalan sistem yang ada. Sistem Sulawesi telah mencapai 10%, namun masih perlu pelajaran dari Hawaii untuk meningkatkan lebih banyak VRE terutama dari aspek teknis dan sistem pendukung,” ungkap Senda.

image by Freepik



Dalam kesempatan yang sama, Chief of Party, USAID Sustainable Energy for Indonesia Andre Larocque menyatakan bahwa USAID siap mendukung program pemerintah Indonesia dalam transisi energi.



“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada USAID dan HNEI atas kerjasamanya dalam menyelenggarakan webinar ini, dan untuk dukungan berkelanjutan kepada Indonesia dalam beberapa kesempatan, terutama pada implementasi energi berkelanjutan di Indonesia,” tutup Senda. (U)

Koordinator Kerjasama Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Senda Hurmuzan Kanam dalam Webinar Energy Transition in the Electricity Sector in Hawaii secara online di Jakarta, (2/2/2022).

IDE SUPERGRID NUSANTARA DIAPRESIASI DAPAT TINGKATKAN BAURAN EBT



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Ditjen Ketenagalistrikan mengapresiasi wacana pembangunan jaringan listrik Supergrid Nusantara. Dengan adanya interkoneksi jaringan listrik, diharapkan bauran energi baru terbarukan (EBT) meningkat. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menyampaikan hal tersebut dalam webinar bertajuk How

Indonesia Power Grid Embrace the Era of Renewable Energy Integration, Rabu (26/1/2022).

Jisman menyampaikan, Supergrid Nusantara digagas oleh Guru Besar Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung (ITB) Almarhum Pekik Argo Dahono yang berpulang menghadap Tuhan YME, Jumat

(21/1/2022) lalu. Gagasan ini disebutnya dapat mengembangkan potensi EBT di Indonesia.

"Terlihat gagasan beliau menghubungkan jaringan listrik dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Karena beliau melihat bahwa potensi EBT kita tidak merata dan jauh dari demand. Salah satu

KEMENTERIAN ESDM KAWAL INFRASTRUKTUR KBLBB

Sebagai salah satu mandatory Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, Kementerian ESDM diberi tugas untuk mengawal infrastruktur KBLBB. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ida Nuryatin Finahari dalam acara Journalis On Duty “Kendaraan Listrik Keren dan Bersahabat” yang diselenggarakan oleh Media Indonesia di Jakarta, Kamis (27/01/2022).

“Dari Perpres tersebut, masing-masing Kementerian/Lembaga diberi tugas yang berbeda, seperti Kementerian ESDM diberi tugas untuk mengawal infrastruktur dari sisi Charging Station. Kementerian Perhubungan mempunyai tugas untuk melakukan konversi mesin tradisional ke mesin kendaraan listrik. Kementerian Perindustrian juga diberi tugas dalam hal Roadmap Peta Jalan Pengembangan KBLBB. Ini semua turunan dari Perpres yang harus disiapkan oleh Kementerian lembaga terkait dalam implementasi kendaraan listrik,” ujar Ida.

Dalam rangka mendukung implementasi Perpres tersebut, Kementerian ESDM telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Peraturan Menteri tersebut memuat antara lain ketentuan standar dan keselamatan instalasi, tarif listrik, serta skema bisnis untuk infrastruktur pengisian listrik untuk KBLBB, baik itu untuk SPKLU maupun SPBKLU. Peraturan ini juga menugaskan kepada PT PLN (Persero) sebagai awalan untuk membangun infrastruktur pengisian listrik, dan dalam pelaksanaannya PLN dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau badan usaha lainnya.

Proses transformasi kendaraan listrik ini disebut Ida sangat memerlukan sosialisasi/kampanye kepada masyarakat. KESDM dalam beberapa kesempatan telah melaksanakan dan mendukung acara yang bertujuan mengkampanyekan penggunaan KBLBB, baik yang diselenggarakan oleh internal KESDM maupun institusi lain, antara lain Public Launching KBLBB pada tanggal 17 Desember 2020, Public Launching Pilot Project Program Konversi Sepeda Motor BBM ke Listrik pada 18 Agustus 2021, launching SPKLU dan SPBKLU di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, juga pelaksanaan berbagai forum diskusi atau webinar mengenai KBLBB.

“Sosialisasi sudah sering dilaksanakan, bahkan kami juga membangun Charging Station di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, itu salah satu contoh,” ungkap ida.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Ikatan Motor Indonesia Pusat Junaidi Elvis menyatakan bahwa IMI sangat mendukung adanya peralihan dari kendaraan bermotor konvensional ke kendaraan bermotor listrik karena murah dan efisien.

“Kami sangat mendukung peralihan kendaraan listrik, nanti paralel sambil dibuat untuk pengisian daya kendaraan listriknya dan sebagainya karena infrastruktur pengisian nya belum merata,” ujar Elvis.

Kementerian ESDM terus berupaya untuk membangun insfrastruktur pengisian daya KBLBB. Menurut data per Desember 2021, telah tersedia sebanyak total 267 unit charging station yang tersebar di 224 lokasi publik di Indonesia. Di Sumatera terdapat 19 lokasi dengan 21 unit terpasang, Banten 17 lokasi dengan 20 unit terpasang, DKI Jakarta 77 lokasi dengan 101 unit terpasang, Jawa Barat 35 lokasi dengan 37 unit terpasang, Jawa Tengah dan DIY 23 Lokasi dengan 27 unit terpasang, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara 37 Lokasi dengan 43 unit terpasang, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku 16 Lokasi dengan 18 unit terpasang.

Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa pemerintah membuka peluang bagi pihak swasta dalam membangun insfrastruktur KBLBB demi mewujudkan percepatan transformasi kendaraan listrik.

“Kita membuka peluang, terbuka lebar untuk membangun infrastruktur KBLBB. Artinya semua badan usaha dan juga swasta diberi kesempatan untuk membangun infrastruktur KBLBB,” tutup ida. (u)



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ida Nuryatin Finahari dalam acara Journalis On Duty “Kendaraan Listrik Keren dan Bersahabat” yang diselenggarakan oleh Media Indonesia di Jakarta, Kamis (27/01/2022).

INI PROGRAM PRIORITAS KETENAGALISTRIKAN DI 2022



Direktur Pembinaan Pengusahaan Idd Nuryatin Finahari dalam acara *Journalis On Duty "Kendaraan Listrik Keren dan Bersahabat"* yang diselenggarakan oleh Media Indonesia di Jakarta, Kamis (27/01/2022).

Umum Tenaga Surya (PJU-TS), 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), 11.347 paket Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL), revitalisasi 11 unit pembangkit listrik EBT, dan bantuan sambung baru listrik sebanyak 80.000 sambungan di yang tersebar di 32 provinsi," ujar Arifin.

Program BPBL merupakan upaya pemerintah untuk membantu pasang baru listrik gratis bagi rumah tangga belum berlistrik. Program ini juga salah satu dari sekian upaya pemerataan akses listrik ke seluruh nusantara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan memberikan bantuan pasang baru listrik 450 VA bagi Rumah Tangga (RT) miskin belum berlistrik yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain program BPBL, program ketenagalistrikan lain juga terus didorong oleh Kementerian ESDM. Diantaranya adalah target kapasitas pembangkit listrik sebesar 76,3 Giga Watt pada 2020 untuk menjaga ketersediaan listrik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada tahun 2020 juga ditargetkan konsumsi listrik per kapita naik sebesar 1.268 kWh/kapita, kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT sebesar 11.791 MW, dan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik ditargetkan 100% pada 2022.

Selain itu penurunan & intensitas penurunan emisi CO2 ditargetkan sebesar 91 juta ton CO2 pada tahun 2022, dan target konversi sepeda motor BBM ke motor listrik sebanyak 1.000 unit sepeda motor di tahun 2022 dengan perluasan program untuk K/L, Pemda, dan BUMN. (U)



Usaha pemerintah dalam melistriki seluruh rakyat di Indonesia terus digencarkan, termasuk dalam mencanangkan program prioritas pada tahun 2022. Salah satu program yang menjadi prioritas Kementerian ESDM di tahun 2022 adalah Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta pada Kamis, (13/01/2022).

"Kegiatan prioritas ESDM tahun 2022 bidang EBTKE dan ketenagalistrikan diantaranya pemasangan 79 unit PLTS Atap, 22.000 paket Penerangan Jalan



Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrkan Wanhar memberikan sambutan dalam Inaugurasi Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Periode 2021-2026 Selasa (18/1/2022), di Jakarta.

AKLI AGAR DAPAT MENDORONG BADAN USAHA MANFAATKAN KEMUDAHAN SI UJANG GATRIK

“AKLI dapat mendorong badan usaha jasa penunjang yang tergabung di dalamnya agar dapat dengan optimal memanfaatkan fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang ada pada SI UJANG GATRIK untuk meningkatkan produktifitas dan kinerjanya,”

WANHAR

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap hasil pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, Pemerintah akan mewajibkan setiap hasil pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik untuk dilaporkan ke Pemerintah secara daring melalui Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG GATRIK). Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrkan Wanhar menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Inaugurasi Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Periode 2021-2026 Selasa (18/1/2022), di Jakarta.

“AKLI dapat mendorong badan usaha jasa penunjang yang tergabung di dalamnya agar dapat dengan optimal memanfaatkan fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang ada pada SI UJANG GATRIK untuk meningkatkan produktifitas dan kinerjanya,” ujar Wanhar.

Aplikasi ini telah diperbarui menjadi SI UJANG GATRIK 2.0 dengan fitur penambahan tenaga teknik. Dengan fitur ini, kontraktor listrik dapat memperluas layanan dan mengembangkan usahanya serta menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

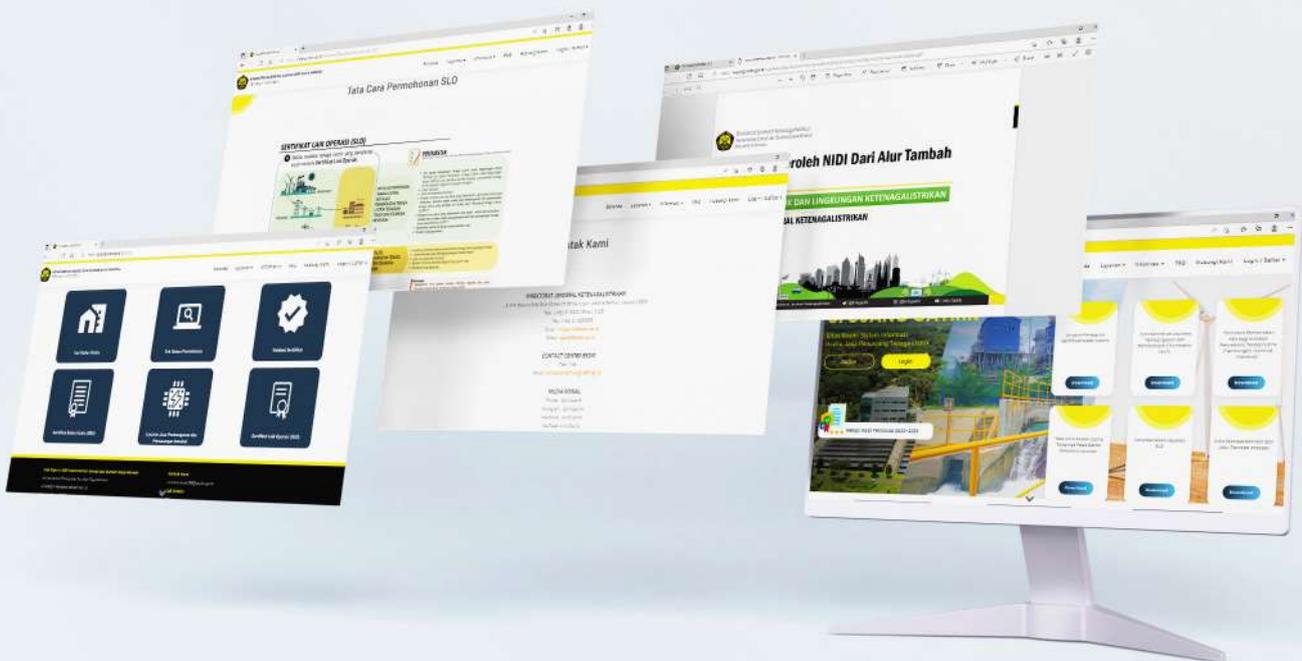
“Melalui SI UJANG GATRIK, pengguna jasa instalatir listrik dapat menemukan pelaku usaha penyedia jasa melalui aplikasi yang terdekat dengan lokasi pengguna jasa, hal ini dapat dijadikan sebagai media promosi bagi badan usaha,” Wanhar menambahkan.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, Pemerintah telah menetapkan perizinan berusaha didasarkan pada tingkat risikonya. Wanhar menyampaikan sebagai usaha jasa yang memiliki tingkat risiko tinggi, pengawasan terhadap usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik akan dilakukan lebih ketat dan apabila terjadi pelanggaran akan ada sanksi yang lebih tegas.

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mewajibkan semua instalasi tenaga listrik yang baru dipasang memiliki Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI).

“Melalui penerapan NIDI, kontraktor/ instalatir listrik juga dituntut untuk semakin profesional dalam melaksanakan pekerjaan,” ujarnya. NIDI sendiri menggambarkan detail informasi suatu instalasi listrik dan merupakan ringkasan dari persyaratan permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO). NIDI diberikan untuk hasil pekerjaan pembangunan dan pemasangan yang dilaksanakan oleh kontraktor/instalatir yang memiliki perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan.

“Kami berharap AKLI sebagai asosiasi badan usaha kontraktor listrik dan mekanikal dengan anggota lebih dari 3.500 badan usaha dan tersebar di seluruh Indonesia dapat mendukung penerapan regulasi ketenagalistrikan untuk tercapainya keselamatan instalasi ketenagalistrikan melalui pemberlakuan NIDI,” pungkasnya. (AMH)



PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON DISIAPKAN REGULASINYA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merilis Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Program Kerja Tahun 2022 subsektor ketenagalistrikan. Capaian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan terdapat lima belas indikator kerja, termasuk di dalamnya penyusunan regulasi terkait Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Pembangkitan Tenaga Listrik.

“Sesuai dengan Perpres yg ada, pemerintah berencana mulai menerapkannya per tanggal 1 April 2022. Penerapan NEK juga sudah kita lakukan melalui pilot project tahun lalu, akan kita tingkatkan ke tahap implementasi. Sudah disepakati akan menerapkan skema cap trade and tax,” tutur Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana pada Konferensi Pers Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Program Kerja Tahun 2022 subsektor ketenagalistrikan virtual, Selasa (18/1/2022).

Rida mengungkapkan PLTU dengan kapasitas kurang dari 100 MW masih belum dapat menerapkan cap and trade and tax dikarenakan PLTU dengan kapasitas di bawah 100 MW masih menjadi backbone sistem kelistrikan di luar pulau Jawa dan Sumatera terutama di daerah 3T dan Emisi CO₂ yang dihasilkan sebesar 13,2 juta CO₂ (6,3% dari total emisi pembangkit listrik nasional).

Rida juga memaparkan progress rencana penerapan carbon credit (cap-trade-tax) yakni Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Pembangkitan Tenaga Listrik yang terdiri dari penerapan batas atas emisi GRK (BAE) melalui persetujuan teknis (PT-BAE), usulan mekanisme dengan Surat Persetujuan Teknis Emisi (PTU) pada PLTU batubara dan dengan trading, Pelaporan Emisi GRK serta penguatan kerangka transparansi yang akan bekerjasama dengan kementerian terkait seperti KLHK dan Kemenperin.

Rida menyatakan kondisi pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tanah air telah melewati masa kritis dan hingga akhir Januari 2022 stok batu bara untuk pembangkit listrik nasional sudah di atas 20 hari operasi (HOP). Oleh karena itu, masyarakat dinilai tidak perlu khawatir akan adanya ancaman pemadaman listrik bergilir.

Realisasi Kinerja 2021

Dalam kesempatan tersebut Rida menyampaikan beberapa kinerja subsektor ketenagalistrikan tahun 2021 diantaranya penambahan pembangkit listrik mencapai 1.901,74 Megawatt (MW), transmisi listrik tercatat bertambah 3.820,61 kilometer sirkuit (kms), kemudian penambahan gardu induk dilakukan sebesar 7.731 Mega Volt Ampere (MVA). Sedangkan jaringan distribusi bertambah 14.480,1 kms, dan penambahan gardu distribusi mencapai 2.775,42 MVA.

Rasio elektrifikasi tercatat mencapai 99,20 persen. Jumlah rumah tangga yang berlistrik telah meningkat 14,85% dalam enam tahun terakhir. Tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 100%.

“Kami sampaikan pula untuk Rasio Elektrifikasi, pada triwulan IV tahun 2021 telah mencapai 99,45%. Kita harapkan di tahun ini Rasio Elektrifikasi dapat mencapai 100%,” ungkap Rida Pemerintah juga tengah berfokus pada pengembangan infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Hingga akhir tahun 2021 jumlah Charging Station telah mencapai 267 unit di 224 lokasi pada area seperti di SPBU dan SPBG, perkantoran, perhotelan, pusat perbelanjaan dan area parkir.





Dalam kesempatan yang sama, Rida juga menyampaikan System Average Interruption Duration Index (SAIDI) atau lama listrik terganggu atau padam per pelanggan dalam satu tahun tercatat 10 jam/pelanggan/tahun di bawah target 15 jam/pelanggan/tahun dan capaian untuk tahun ini adalah 6 kali pelanggan/tahun atau mencapai 140% dari target. Sedangkan System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) Nasional atau berapa kali listrik terganggu atau padam per pelanggan dalam satu tahun hanya 8 kali/pelanggan/tahun dan capaian untuk tahun ini adalah 4 kali pelanggan/tahun atau mencapai 150% dari target.



“Ada perbaikan di tingkat PLN, dan adanya peningkatan capaian kerja yang diatas 100%, untuk SAIDI sebesar 140 persen, dan SAIFI sebesar 150%,” ujar Rida.

Rida menjelaskan terkait jumlah pelanggan listrik, target 2021 terjadi penambahan sebanyak 79,187 ribu pelanggan. Untuk realisasi 2021 terjadi penambahan sebanyak 81.530 ribu pelanggan atau sekitar 103%.



Ia juga menjelaskan untuk konsumsi listrik per kapita, terjadi peningkatan konsumsi listrik per kapitanya sebesar 1.123 kWh atau 93,3% dari target 2021 yang sebesar 1.203 kWh/ Kapita. Investasi subsektor ketenagalistrikan tercatat sebesar USD6,75 miliar atau 68,1% dari target USD 9,91 miliar. Terkait realisasi untuk Penurunan emisi CO2 Pembangkit di tahun 2021 status data prognosis triwulan IV 2021 mencapai 10,37 juta ton atau sekitar 210,8% dari target 2021 yang sebesar 4,93 juta ton. Sedangkan untuk prosentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 34 % dibanding dengan tahun 2020 sebesar 35,01%. “Untuk investasi dan TKDN semua masih menunjukkan capaian yang dibawah target, hal ini disebabkan pandemi yang masih berdampak, meskipun tahun ke tahun kita growth, selalu ada penambahan,” tegas Rida.

Susut jaringan tenaga listrik tahun lalu hanya 8,39%, lebih rendah dari target sebesar 9,2%. Sementara untuk penurunan emisi CO2 pembangkit mencapai 8,78 juta ton atau hampir 2 kali lipat dari target 4,71 juta ton (186%).

“Untuk susut ada perbaikan sedikit, kita upayakan untuk ditekan terus, besaran susut akan mempengaruhi BPP, bila BPP berpengaruh subsidi dan kompensasi tenaga listrik juga berpengaruh,” jelas Rida



“Dari hari ke hari much getting better dan dengan sendirinya ancaman ke mati lampu atau pemadaman bergilir bisa dikatakan tidak perlu khawatir lagi,” tutup Rida. (AT)



Penguatan ekosistem KBLBB merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060. vArifin menyebut upaya lain yang dilakukan pemerintah, di antaranya retirement PLTU secara bertahap, penggunaan kompor listrik, pemanfaatan teknologi yang lebih efisien, serta penerapan smart grid untuk

SEMAKIN BERTAMBAH, 267 SPKLU DAN 266 SPBKLU TELAH DIBANGUN

Sebanyak 267 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan 266 Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah dibangun pada 2021. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022, Rabu (12/1/2022), di Jakarta.

“Untuk mendorong KBLBB, kita perlu siapkan dulu infrastrukturnya. Konsumen kendaraan listrik harus bisa lebih didorong karena ini menurunkan emisi di sektor transportasi secara lebih signifikan,” ujar Arifin.

Ia menambahkan Kementerian ESDM mempunyai Program Konversi 100 Sepeda Motor BBM ke Listrik yang diluncurkan pada 18 Agustus 2021. Hingga Desember 2021, 71 unit sepeda motor telah dikonversi menjadi sepeda motor listrik, sedangkan 29 unit dalam proses penyelesaian konversi. Untuk tahun 2022, target sepeda motor yang dikonversi mencapai 1.000 unit dengan perluasan program untuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara.

“Dengan adanya program konversi ini, pemilik sepeda motor tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli motor baru. Dari segi pemakaian bahan energi, pemakaian kendaraan sepeda motor listrik ini akan mengeluarkan biaya sepertiga dibanding harga BBM,” tuturnya.

Arifin menambahkan program konversi ini dapat mengembangkan industri untuk pembuatan baterai. Menurutnya, program ini juga mampu menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui bengkel-bengkel untuk melakukan konversinya.

mengatasi variable renewable energy. Strategi lainnya adalah percepatan pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), terutama tenaga surya dan angin.

“Kita memiliki sumber tenaga hydro yang cukup besar dan geothermal. Tapi kami melihat bahwa tren surya dan angin semakin kompetitif dan implementasinya bisa lebih cepat,” kata Arifin.

Dalam kesempatan tersebut, Arifin juga membeberkan capaian subsektor ketenagalistrikan pada tahun 2021, yakni kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 74 GW, konsumsi listrik per kapita mencapai 1.123 kWh/kapita, dan Rasio Elektrifikasi (RE) sebesar 99,45%. Selain itu, total kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT sebesar 11.152 MW.

“Realisasi bauran EBT sebesar 13,5%, meningkat dibandingkan target sebesar 12,9%,” Arifin menambahkan.

Dalam konferensi pers ini juga disampaikan capaian-capaian di subsektor minyak dan gas bumi, mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan konservasi energi, kegeologian, pengembangan sumber daya manusia, serta penelitian di ESDM. Konferensi pers ini dihadiri pejabat eselon I di lingkungan Kementerian ESDM. (AMH)

LANTIK 49 PNS,

Sekjen KESDM Tekankan Kerja Keras Dan Profesionalisme Aparatur Negara

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut bekerja keras dan profesional dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dipercayakan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terutama kepada masyarakat yang dalam era reformasi ini telah mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap setiap pelayanan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Ego Syahrial pada Pengambilan Sumpah/Janji PNS Tahun 2019 di Lingkungan KESDM, di Jakarta, Kamis (6/1/2022).

"Sebagai PNS yang sudah diangkat tentunya Saudara-saudara mempunyai tanggung jawab moral dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan pada pundak Saudara, untuk itu Saudara harus mengembangkan potensi baik pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan sikap perilaku sebagai PNS," ujar Ego.

Ego menjelaskan bahwa sebagai aparatur negara, PNS dituntut untuk bekerja secara profesional, karena kinerja yang baik akan sangat membantu dan bermanfaat bagi pimpinan KESDM, dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang akan sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pemerintahan umum dan pembangunan pada umumnya, dan sektor ESDM pada khususnya.

Seperti yang diketahui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kementerian yang mempunyai peran yang sangat strategis dan mengemban tugas negara yang sangat berat, antara lain tugas untuk melakukan pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam yang pada saat ini masih menjadi harapan dan tumpuan negara, dalam rangka menghasilkan devisa untuk penerimaan Negara yang secara signifikan masih sangat besar jumlahnya.

"Untuk melakukan pengelolaan tersebut diperlakukan adanya sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan serta profesional dalam melaksanakan tugasnya untuk menggali dan mengelola secara bijak potensi sumber daya alam tersebut," ungkap Ego.

Ia mengharapkan untuk kedepan PNS diharapkan menjadi generasi muda yang handal serta mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, dalam melaksanakan tugas

pemerintahan dan pembangunan khususnya pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta mampu membawa citra dan nama Kementerian, sebagaimana penerapan Core Value Ber-AKHLAK, karena pada suatu saat nanti kami secara alami akan mengalami purna bakti dan pensiun.

"Untuk itu sebagai generasi penerus kami harap kelak dikemudian hari, Saudara akan meneruskan estafet kepemimpinan, menggantikan generasi terdahulu, oleh sebab itu Saudara menjadi tumpuan harapan kami agar dapat melanjutkan kinerja yang telah dibangun selama ini yang telah berjalan dengan baik, agar dapat ditingkatkan lebih baik lagi dimasa yang akan datang," ujar Ego.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang disumpah saat ini sebanyak 49 PNS di lingkungan Kementerian ESDM, yang terdiri dari 4 PNS Sekretariat Jenderal, 6 PNS Ditjen Migas, 6 PNS Ditjen Ketenagalistrikan, 6 PNS Ditjen Minerba, 4 PNS Ditjen EBTKE, 3 PNS Inspektorat Jenderal, 10 PNS Badan Geologi, 4 PNS Badan Litbang ESDM, 3 PNS BPSDM ESDM, 2 PNS Setjen DEN, dan 1 PNS BPH Migas. PNS yang diangkat di Ditjen Ketenagalistrikan meliputi 1 Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, 1 Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, 1 Pengelola Kepegawaian, 1 Analis Program Ketenagalistrikan dan 2 Analis Ketenagalistrikan.

"Kepada para pejabat yang membawahi para PNS ini, saya menitip pesan, agar Saudara secara terus menerus mengawasi dan membina dengan sebaikbaiknya kinerja PNS di lingkungan masing-masing agar kelak menjadi penerus yang unggul dalam pelaksanaan tugasnya," tutup Ego. (AT)



Pengambilan Sumpah/Janji PNS Tahun 2019 di Lingkungan KESDM, di Jakarta, Kamis (6/1/2022).

DUKUNG EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK, PLN TAMBAH DUA SPKLU DI KANTOR DITJEN KETENAGALISTRIKAN



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril, dan General Manager PLN UID Jakarta Doddy B. Pangaribuan meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Selasa (4/1/2022).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendukung upaya PT PLN (Persero) dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, dengan mengoperasikan dua unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta. Peresmian pengoperasian SPKLU dilakukan pada Selasa (4/1/2022) oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril, dan General Manager PLN UID Jakarta Doddy B. Pangaribuan. Acara ini dihadiri juga oleh media dan Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (KOLEKSI).





"Melalui kesempatan ini, kami mengapresiasi peran dan kontribusi PT PLN (Persero) atas segala upaya dan komitmennya dalam mendukung terbentuknya ekosistem KBLBB, salah satunya dukungan bagi program penggunaan KBLBB untuk keperluan operasional dinas Pemerintah melalui penyediaan infrastruktur SPKLU di kantor pemerintah," ujar Ida.

Ia menyampaikan PLN perlu terus berkolaborasi dan berinovasi dengan berbagai stakeholder agar terjadi akselerasi implementasi KBLBB.

Dua SPKLU yang diresmikan adalah SPKLU warna biru Delta 25kW DC dan 22kW AC dan SPKLU warna hitam Phihong 30kW DC. Keduanya tergolong dalam medium charging dengan perkiraan waktu pengisian 4 jam, yang cocok dipasang di perkantoran dengan waktu parkir yang cukup lama.

Pada kesempatan yang sama, Bob Saril mengatakan, transisi energi merupakan keharusan yang diperlukan untuk menjaga ketersediaan energi di masa mendatang dan memperbaiki neraca perdagangan dengan mengurangi biaya impor energi.

"Indonesia dalam pertemuan G20 dan COP26 mencanangkan Net Zero Emission di tahun 2060 sehingga diperlukan percepatan program transisi ke penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan khususnya transportasi melalui akselerasi penggunaan kendaraan listrik," kata Bob.

Ia mengatakan kendaraan listrik lebih ekonomis dan lebih berwawasan lingkungan dibandingkan kendaraan yang menggunakan internal combustion engine. Bob menerangkan untuk jarak 10 km, kendaraan listrik hanya membutuhkan Rp1.100,-. Ini lebih murah dibanding pengeluaran mobil berbahan bakar minyak sebesar Rp9.000,- untuk jarak yang sama.

Selain itu, ia melanjutkan, PLN juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi pemilik kendaraan listrik.

"PLN memberikan keringanan pasang baru dan tambah daya di rumah bagi pelanggan PLN yang memiliki kendaraan listrik. Untuk tambah daya, bayarnya hanya Rp150.000,- yang biasanya

sampai 4,8 juta. Dan kita juga melakukan pemasangan home charging. Waktu pemasangan itu, tambah dayanya gratis. Selain itu, dalam pemakaian sehari-hari diskon 30% untuk pemakaian jam 10 malam hingga jam 5 pagi," ujar Bob.

Bob menambahkan sebagai badan usaha yang diberi mandat menjadi pelopor dan pendorong ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, dan berdasarkan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020, PLN terus berupaya untuk memenuhi target SPKLU.

"Sebanyak 114 SPKLU di seluruh Indonesia sudah dipasang dan digunakan," katanya.

Untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, PLN juga telah menyediakan fitur SPKLU yang terdapat pada aplikasi PLN Mobile. Fasilitas ini akan memudahkan pengguna kendaraan listrik dalam mengisi energi menggunakan SPKLU. (AMH)



MENTERI ESDM SERAHKAN DIPA 2022, SEBAGIAN BESAR ANGGARAN UNTUK KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL DAN PENGUATAN AKSES ENERGI

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 kepada 12 unit organisasi dan 32 satuan kerja (satker), Senin (27/12/2021), secara hybrid. Penyerahan DIPA dilakukan kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh.

"Tahun Anggaran 2022, Kementerian ESDM mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,89 triliun. Alokasi anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk kegiatan prioritas nasional dan kegiatan dalam rangka penguatan akses energi bagi masyarakat," Arifin mengungkapkan.

Salah satu kegiatan prioritas nasional dan penguatan akses energi bagi masyarakat adalah Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Masyarakat Tidak Mampu melalui APBN oleh Ditjen Ketenagalistrikan. Kegiatan penguatan akses energi lainnya adalah Jaringan Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang, Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Konverter Kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk Nelayan dan Petani, Penerangan Jalan Umum-Tenaga Surya (PJU-TS), Revitalisasi PLT-EBT, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).

Arifin mengharapkan pelaksanaan anggaran tahun 2022 dapat lebih baik dari tahun 2021. Menurutnya hal ini dapat tergambar dari serapan anggaran yang terdistribusi lebih merata sepanjang tahun yang diikuti dengan realisasi anggaran yang tidak menumpuk di akhir tahun.

Ia lantas menyebutkan perlunya upaya untuk percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2022 di lingkungan Kementerian ESDM.

“Saya menginstruksikan agar seluruh unit mulai menyusun Risk Register untuk setiap kegiatan utama terkait penyerapan anggaran, dengan mengidentifikasi setiap risiko dan pengendaliannya,” ujarnya. Arifin menegaskan tender paket pekerjaan agar segera diselesaikan sehingga dapat langsung dieksekusi.

Sesuai arah Presiden Joko Widodo, Arifin menyampaikan dalam pelaksanaan anggaran dibutuhkan fleksibilitas penggunaan anggaran agar dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada.

“Namun demikian, dibutuhkan kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran,” ujarnya mewanti-wanti.

Dalam kesempatan yang sama, Arifin juga menyaksikan dua belas orang pemegang program menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja TA 2022. Penandatanganan tersebut merupakan bentuk komitmen dalam melaksanakan, mengelola, mempertanggungjawabkan APBN dengan transparan, akuntabel, tepat waktu dan bebas dari KKN. (AMH)



Dua belas unit Eselon I pemegang program menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja TA 2022, Senin (27/12/2021).

KEMENTERIAN ESDM DAN PLN SIAP AMANKAN PASOKAN LISTRIK JELANG NATARU



Menteri ESDM Arifin Tasrif melaksanakan kunjungan Kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling, di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jumat (24/12/2021).

Dalam rangka mengamankan pasokan listrik jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) telah menyiagakan petugas di seluruh wilayah Indonesia. Pengamanan pasokan listrik menjadi hal yang vital khususnya karena pembatasan kegiatan yang membuat masyarakat lebih sering memanfaatkan penggunaan listrik rumah tangga. Secara nasional, terdapat kenaikan konsumsi listrik sebesar 4,5 persen.

Menteri ESDM Arifin Tasrif memerintahkan PLN untuk menyiapkan keandalan sistem ketenagalistrikan dan mengantisipasi adanya gangguan sehingga meminimalisir terjadinya pemadaman (black out). Hal tersebut disampaikan Arifin saat kunjungan Kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling, di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Jumat (24/12/2021).

"Nataru kali ini masrarakat tidak boleh liburan, akibatnya pemakaian listrik jadi banyak diperkirakan kenaikan 4,5% di Jamali," jelas Arifin.

Arifin berpesan agar PLN rajin memeriksa keandalan sistem, baik itu prediktif, preventif, maupun maintenance. PLN sendiri diapresiasi telah mengamankan bahan baku untuk energi primer serta kesiapan tenaga kerja selama H-7 sampai H+7 periode Nataru ini.

Dalam kesempatan yang sama, Arifin menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan energi yang terjangkau. Arifin menjelaskan masyarakat Indonesia mempunyai keterbatasan daya beli, dan negara membutuhkan investasi masuk. Ia mengimbau PLN untuk mempermudah investasi di subsektor ketenagalistrikan ini.

"Kita tidak bisa mengandalkan belanja lokal, pertumbuhan harus didukung oleh investasi besar-besaran. Tarik investasi, mudahkan, jangan dipersulit," ujarnya.

Pemerintah sendiri disebut Arifin telah menyiapkan sederet strategi untuk penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Arifin menyebutkan, saat ini tengah disiapkan peta transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) untuk periode 2021-2060. Ia mengajak semua pihak mempunyai satu visi yaitu menyiapkan transisi yang baik.



Kementerian ESDM disebutkan telah menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030 yang merupakan Green RUPTL dengan penambahan kapasitas EBT 20,9 GW dan dikembangkan secara merata di semua sistem kelistrikan dengan memperhatikan neraca daya sistem.



"Pemerintah telah menyiapkan Perpres tentang tariff EBT, dimana kita akan memasukan energi bersih terbarukan sebesar hampir 21 GW. Ini akan menarik investasi antara 5,5-6M dollar per tahun, itu belum termasuk super grid. Kita tidak bisa memanfaatkan lagi fosil ke depan," ungkap Arifin.



Dalam kesempatan yang sama Arifin mengungkapkan, Kementerian ESDM bersama dukungan dari PLN telah mengembangkan proyek konversi sepeda motor bekas menjadi kendaraan listrik. Ia mengatakan bahwa pemerintah melakukan percobaan konversi sepeda motor konvensional menjadi motor listrik. Hal ini melihat potensi motor bekas di Indonesia mencapai 130 juta unit.

"Ada 130 juta motor yang beroperasi. Usianya macam-macam ada yang lebih 10 tahun, yang 10 tahun ini bisa diganti dengan motor listrik," katanya. (AT)

Sumber: <https://www.antaraneews.com/berita/2518205/plta-saguling-berfungsi-sebagai-filter-air-di-sungai-citarum>

DITJEN KETENAGALISTRIKAN

SIAP JALANKAN PROGRAM TAHUN 2022

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dapat berjalan dengan baik agar pelayanan agar sektor ketenagalistrikan ke depannya makin membaik. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana pada Rapat Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jumat (17/12/2021).

"Listrik sudah menjadi kebutuhan dasar dan ini menyentuh masyarakat, dimanapun akan kemudian menjadi urusan masyarakat maka itu menjadi tantangan, hambatan kendala akan selalu hadir dan untuk itulah kita harus tetap ada," ujar Rida.

Sub sektor ketenagalistrikan memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan selaku regulator di bidang Ketenagalistrikan harus memastikan agar pasokan tenaga listrik tersedia dengan kapasitas cukup, merata, berkualitas baik, akrab lingkungan, dan dengan harga yang terjangkau, melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM dan Renstra Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Rida menjelaskan, evaluasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2021 diperlukan untuk melihat sisi mana saja yang perlu diperkuat atau diperbaiki agar pelaksanaannya di tahun 2022 dapat lebih baik.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana menyampaikan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 pada Rapat Kerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jumat (17/12/2021).



"Inovasi-inovasi semacam penggunaan teknologi informasi terus ditingkatkan, di tengah-tengah kita harus menjamin segala macam keterbukaan akuntabilitas yang diamanahkan dengan sesuai aturan," jelas Rida.

Realisasi Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan TA. 2021 hingga 16 Desember 2021 telah mencapai 94,3% dari PAGU revisi sebesar 131,35 miliar rupiah. Sedangkan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan November 2021 sebesar 97,21. Rida mengungkapkan agar kinerja pelaksanaan anggaran dapat terus ditingkatkan hingga akhir tahun anggaran.

"Selain pencapaian dalam pengelolaan anggaran, saya juga mengapresiasi capaian kinerja yang telah kita targetkan bersama di tahun 2021 ini. Saya harap kinerja baik ini dapat ditingkatkan di masa-masa yang akan datang," kata Rida.



Beberapa pencapaian dalam peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan seperti kapasitas pembangkit listrik, penambahan jaringan transmisi dan gardu induk, peningkatan rasio elektrifikasi, hingga konsumsi listrik per kapita diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia.

Dalam rapat kerja tersebut masing-masing pejabat tinggi pratama juga menyampaikan pemaparan Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi tahun 2021 serta Rencana Kegiatan tahun 2022, termasuk progres penyelesaian pending matters isu strategis yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.

"Masing-masing yang hadir disini, dan juga virtual, bisa mengerti sedikit banyak substansi masing-masing unitnya dan unit lain, sehingga bisa menemukan benang merah diantara satu sama lain yang ujung-ujungnya bisa menciptakan pelayanan ketenagalistrikan yang makin prima," ungkap Rida.



Pemanfaatan anggaran TA 2022 di Ditjen Ketenagalistrikan lebih diarahkan pada kegiatan non-fisik yang mendukung tugas dan fungsi Ditjen Ketenagalistrikan, antara lain pengendalian kegiatan prioritas, pelayanan publik, regulasi, dan pengawasan. Namun ada beberapa kegiatan pembangunan fisik melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga tidak mampu belum berlistrik melalui APBN tahun 2022. Program-program tersebut harus dikawal sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa penilaian reformasi birokrasi Kementerian ESDM terus membaik. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat dan pemberian pelayanan publik yang cepat, tepat dan produktif.

Pada akhir acara terdapat Penandatanganan Kinerja yang merupakan rutinitas setiap pergantian tahun yang terkait Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Mudah-mudahan ini tetap memicu semangat teman-teman semua," tutup Rida. (AT)





Penandatanganan Perjanjian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2022 oleh Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dilakukan pada Jumat (17/12/2021) di Bogor, Jawa Barat.

WUJUDKAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH, DITJEN KETENAGALISTRIKAN LAKUKAN PENANDATANGANAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2022 pada Jumat (17/12/2021) di Bogor, Jawa Barat. Penandatanganan perjanjian kinerja ini dilaksanakan sesuai Rapat Kerja (Raker) yang membahas evaluasi kinerja dan anggaran tahun 2021 dan rencana selanjutnya untuk tahun 2022. Dalam penandatanganan tersebut, Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Munir Ahmad, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin

Finahari, dan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2022 dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah periode tahun 2020-2024, yang disaksikan langsung oleh Dirjen Ketenagalistrikan, Rida Mulyana.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa Perjanjian Kinerja ini dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan tentang Sistem

"Penandatanganan Kinerja ini adalah rutinitas setiap pergantian tahun, terkait Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Mudah-mudahan ini tetap memicu semangat teman-teman semua," ujar Rida.

Pada tahun 2022, Ditjen Ketenagalistrikan diberikan wewenang untuk mengelola anggaran sebesar Rp242.397.821.000,- dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain:

1. Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional sebesar 70,33 (skala 100)
2. Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional sebesar 88,38 (skala 100)
3. Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebesar 100 (skala 100)
4. Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan sebesar 2,30 (skala 4)
5. Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan sebesar 100%
6. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan sebesar 83,23 (skala 100)
7. Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/Rekomendasi) sebesar 3
8. Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan sebesar 4,00 (level skala 5)
9. Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan sebesar 83,45 (nilai skala 100)
10. Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan sebesar 80,50 (indeks skala 100)
11. Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan sebesar 79,00 (nilai skala 100)
12. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan sebesar 76,00 (nilai skala 100)
13. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan sebesar 94,00 (nilai skala 100)
14. Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan sebesar 3,57 (indeks skala 4)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja, pimpinan instansi yang lebih tinggi akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN akan disajikan dalam Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran. (AMH)



KERJASAMA PROSES TRANSISI ENERGI, INDONESIA TEKEN MOU DENGAN SINGAPURA

Dalam rangka mendukung proses transisi energi, Pemerintah melakukan kerja sama dengan negara lain untuk saling membantu proses transisi, salah satunya dengan Singapura. Beberapa waktu lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) di bidang kerja sama energi. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan

Interkoneksi listrik antara Indonesia dan Singapura, disebut Ida didasari atas permintaan Singapura yang membutuhkan pasokan tenaga listrik dari sumber energi baru dan terbarukan. Indonesia memiliki posisi strategis baik secara geografis dan juga memiliki potensi EBT yang besar. Namun demikian, keputusan untuk melakukan ekspor listrik ke Singapura harus berdasarkan seberapa banyak benefit yang bisa diperoleh Indonesia apabila dibandingkan dengan kebutuhan biaya

Nasional Djoko Siswanto menyatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki kerja sama antar negara-negara ASEAN, di antaranya adalah kerja sama untuk membangun jaringan pipa gas dari Batam dan Natuna ke Singapura.

"Dan juga ada program namanya kerja sama ASEAN Power Grid,

yaitu membangun jaringan listrik antarnegara ASEAN untuk ketahanan energi di negara-negara ASEAN. Jadi kita saling mengisi apabila kita terjadi kekurangan," ujar Djoko.

Interkoneksi listrik Indonesia dan Singapura berupa grid tenaga listrik lintas negara, disebut Ida terdiri atas saluran transmisi kabel bawah laut dan gardu induk pendukungnya. Dalam hal interkoneksi point-to-point, maka dapat mempergunakan teknologi arus bolak-balik AC, sehingga hanya diperlukan trafo perubah tegangan baik di sisi Indonesia dan di sisi Singapura. Kemudian dalam hal interkoneksi grid-to-grid, maka diperlukan teknologi arus searah DC. Untuk itu diperlukan investasi peralatan konverter dan inverter yang lebih besar, untuk memasang gardu induk konversi yang berlokasi di posisi landing station di gardu induk Singapura.

"Kepemilikan interkoneksi lintas negara perlu dikelola bersama antara Indonesia dan Singapura, melibatkan power utility company seperti PT PLN (Persero) atau PLN Batam dengan Singapore Power. Perlu dilakukan joint-investment antara pihak Singapura dan Indonesia," tutup Ida. (U)



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam acara Energy Corner Squawk Box "Indonesia Ekspor Listrik ke Singapura" yang diselenggarakan oleh CNBC TV di Jakarta, Senin, (07/02/2022).

Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam acara Energy Corner Squawk Box

"Indonesia Ekspor Listrik ke Singapura" yang diselenggarakan oleh CNBC TV di Jakarta, Senin, (07/02/2022).

"MoU ini untuk menaungi Working Group pembahasan ekspor listrik lintas negara, di mana akan dibahas mengenai regulasi dan aturan teknis untuk ekspor. Selain itu juga dalam MoU juga tertuang mengenai penelitian dan pengembangan mengenai Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)," ungkap Ida.

investasi, dan pemanfaatan sumber daya EBT yang sebagian akan digunakan untuk keperluan ekspor listrik.

"Hal-hal yang perlu mendapat pertimbangan dan kajian cost and benefit analysis dengan mempertimbangkan manfaat bagi negara, bagi korporasi yang terlibat dalam kegiatan ekspor listrik, dan bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berlokasi di kepulauan Riau," ujar Ida.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Dewan Energi

4 NOS!

**PEJABAT DAN PEGAWAI DITJEN GATRIK
TIDAK MENERIMA PEMBERIAN APAPUN**



**Segala bentuk pelanggaran akan diproses
sesuai ketentuan yang berlaku.**



NO BRIBERY

(Tidak boleh ada suap menyuap)



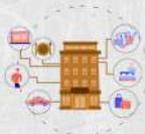
NO KICKBACK

(Tidak boleh ada uang komisi)



NO GIFT

(Tidak boleh ada hadiah yang tak wajar)



NO LUXURIOUS HOSPITALITY

(Tidak boleh ada jamuan yang berlebihan)

Korupsi dan Gratifikasi

wbs.esdm.go.id



WHISTLE BLOWING SYSTEM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketidakpuasan pelayanan publik

lapor.go.id





Kerja Cepat, Kerja Cermat, Kerja Produktif

 gatrik.esdm.go.id /  [Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan](#) /   [@infogatrik](#) /  [Info Gatrik](#)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.gatrik.esdm.go.id